

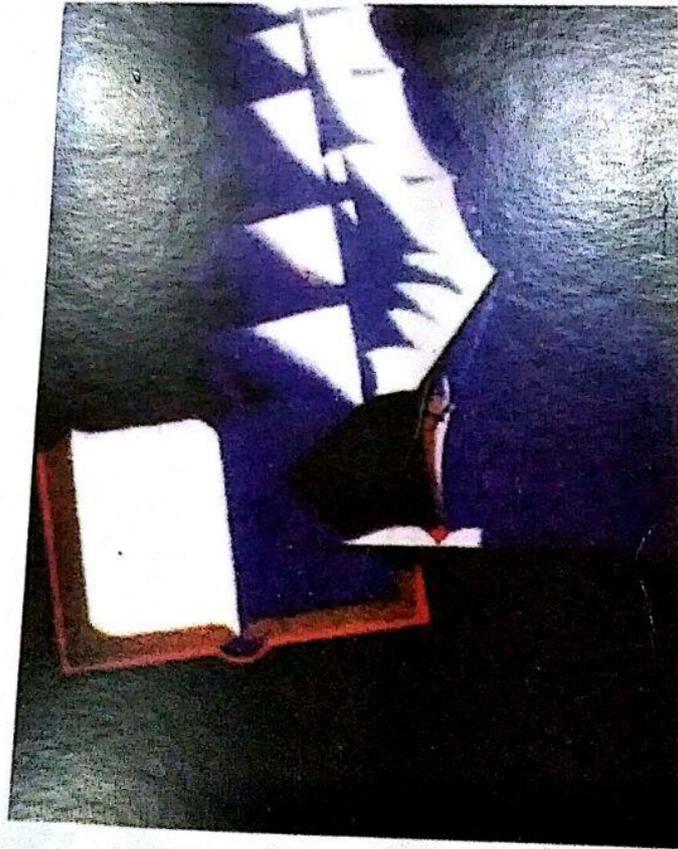
Wahana, Volume 1 No 12., Ganjil, Tahun Akademik 2016/2017

ISSN 853-5876



Wahana

JURNAL BAHASA, SASTRA, KOMUNIKASI, DAN BUDAYA



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR

Nama : Intan Tri Kusumaningtias
Judul : Strategi Komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kepulauan Riau (Studi Kasus KPID Periode 2011-2014)

ABSTRAK

Indonesia adalah Negara yang terdiri dari daerah Kepulauan. Terdapat dua belas kepulauan yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga. Termasuk Kepulauan Riau (Kepri). Kepri merupakan wilayah yang luas namun dengan jumlah penduduk yang jarang. Kepadatan hanya terdapat di kota Batam, Karimun dan Pulau Bintan. Permasalahan daerah perbatasan sangatlah kompleks, ini diakibatkan banyaknya siaran asing yang masuk ke wilayah Kepri serta kurangnya investor yang berminat sebagai pelaku penyelenggara penyiaran di daerah pesisir,.

Strategi adalah kiat-kiat yang dilakukan terhadap pencapaian suatu manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Proses yang digunakan adalah proses untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, teori manajemen yang dikenal dengan POAC bertujuan untuk mengetahui *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Penggerak), *Controlling* (Pengawasan) dan *Evaluating* (Evaluasi).

Penelitian yang dilakukan menggunakan sifat deskriptif. Metode yang digunakan adalah metode studi kasus, dengan melakukan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan hasil penelitian dan membandingkan hasil pengamatan dengan observasi dan wawancara mendalam dengan beberapa narasumber dari Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kepulauan Riau, Kepala Sub Bagian (Kasubag) KPID Kepri, Direktur PT. Radio Azam Mitra Umat.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa strategi komunikasi antara KPI, KPID, KPIDP serta Instansi-instansi terkait dan juga TNI dibutuhkan kerja sama guna tercapainya informasi di daerah perbatasan, menjaga kedaulatan serta melestarikan budaya yang melekat di Kepulauan Riau yaitu Budaya Melayu.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Sejalan dengan perkembangan zaman pada saat ini, di dalam kehidupan masyarakat pada umumnya peranan komunikasi di segala bidang menjadi sangat penting, baik di lihat dari segi ekonomi, politik, sosial dan budaya. Artinya semua upaya dilakukan untuk, mengadakan suatu hubungan dalam segala bidang baik di dalam perusahaan maupun dalam kehidupan sehari-hari, dimana diperlukan suatu bentuk komunikasi yang harus dilakukan secara terencana dan sistematis.

Untuk itulah dibutuhkan hubungan yang dilandasi oleh sikap saling percaya demi pemenuhan kebutuhan fisik material maupun spiritual, dimana hubungan tersebut dilakukan dengan komunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Karena itulah dalam rangka pemantapan kualitas pengetahuan dan kinerja organisasi atau instansi pemerintah di dalam membangun reputasi yang kompetitif ini, maka komunikasi berperan penting dalam memberikan informasi.

Komunikasi yang efektif adalah penting bagi semua organisasi atau instansi, oleh karena itu bagi para pemimpin dan para komunikator dalam organisasi perlu memahami dan menyempurnakan kemampuan berkomunikasi. (Kohler, 2005: 1).

Pembangunan nasional dipandang oleh sebagian masyarakat sebagai suatu proses guna menciptakan berbagai perubahan yang berjalan dengan cepat dari arah yang baik kearah yang lebih baik maupun perubahan-perubahan yang

membawa berbagai kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pembangunan nasional yang dimaksud yaitu pembangunan yang menyeluruh baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta termasuk didalamnya pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya sebagai mana telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia. Mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dewasa ini, kenasionalisme masyarakat Indonesia terlihat menurun. Salah satu penyebabnya yakni gempuran tayangan asing yang masuk bertubi-tubi ke Indonesia, hingga tanpa disadari bahwa tayangan itu memberi dampak bagi perubahan yang signifikan bagi pola pikir, perilaku sampai kebiasaan-kebiasaan yang dari pada pemain film atau pemeran dari suatu tayangan. Ironisnya, mayoritas masyarakat cenderung meniru dan bahkan mengikuti budaya asing yang masuk melalui televisi maupun radio. Persoalan tersebut berkembang menjadi luas bagi provinsi-provinsi daerah yang berbatasan langsung dengan negara luar. Bukannya budaya nasional yang berkembang namun justru budaya asing yang mulai menggerogoti nilai kebudayaan masyarakat di Indonesia. Lembaga yang mengawasi penyiaran pun mengambil andil dalam persoalan ini. Menjadi perhatian khusus bagi KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) selaku lembaga independent yang mengawasi persoalan dalam penyiaran ini. KPI menganggap makin tipisnya pertahanan kedaulatan dalam permasalahan yang terjadi di daerah perbatasan.

Di dalam pasal 3 Penyiaran disebutkan bahwa penyiaran diselenggarakan dengan tujuan salah satunya untuk memperkuat integritas nasional, dalam hal ini KPI kemudian mengambil suatu kebijakan untuk menyentuh persoalan daerah perbatasan dari sisi siaran.

Secara empirik, kebutuhan akan informasi, edukasi dan hiburan melalui penyiaran di wilayah perbatasan di negara kita belum terpenuhi. Bahkan masih ada interference lembaga penyiaran asing baik dari Malaysia, Singapura, Timor Leste bahkan Australia. Dengan demikian, di dalam konteks penataan sistem penyiaran atau landscape penyiaran Indonesia, KPI menginisiasi untuk membuat database dan blue print yang terkait dengan keberadaan lembaga penyiaran atau layanan penyiaran di wilayah perbatasan. Tujuannya agar kebutuhan masyarakat akan informasi, pendidikan dan hiburan di wilayah perbatasan dapat terpenuhi.

Langkah kongretnya KPI menyelenggarakan forum pertemuan antara KPI pusat dengan 12 (dua belas) KPID di wilayah perbatasan yang diselenggarakan di Batam pada tanggal 28-30 Juni 2012. KPIDP (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Perbatasan) ini terdiri dari 12 Provinsi kawasan perbatasan dengan negara luar di Indonesia. Provinsi-provinsi tersebut antara lain KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) Kalimantan Barat, KPID Kalimantan Timur, KPID Nusa Tenggara Timur, KPID Papua, KPID Papua Barat, KPID Riau, KPID Kepulauan Riau, KPID Maluku, KPID Maluku Utara, KPID Aceh, KPID Sulawesi Utara dan KPID Sumatra Utara.

Tepatnya di Mercure Hotel forum ini dilaksanakan, pertemuan ini masing-masing KPID mempresentasikan hasil mapping keberadaan lembaga

penyiaran, kondisi geografis dan beberapa persoalan penyiaran serta dampak-dampak di wilayah KPID yang secara administratif berhubungan dengan layanan penyiaran di wilayah perbatasan tersebut.

Selain itu dalam pertemuan juga dibahas bagaimana memaksimalkan peran Lembaga Penyiaran Publik (TVRI dan RRI) dan LPP Lokal untuk melayani kebutuhan akan informasi, hiburan dan edukasi bagi masyarakat perbatasan, dalam konteks mengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang berfungsi sebagai perekat sosial atau pemersatu integrasi bangsa (Mochamad Riyanto, 2012).

Pada momentum perkembangan kemajuan teknologi penerangan dan komunikasi sekarang ini. Indonesia menuju ke arah terciptanya masyarakat informasi. Masyarakat diusahakan mampu memanfaatkan dan mendayagunakan informasi yang lengkap dan akurat bagi kelangsungan hidupnya. Pemerintah Indonesia senantiasa mengusahakan agar semua informasi penting dan bermanfaat tersebut dapat tersalurkan dengan baik kepada masyarakat. Dengan didukung teknologi, pemerintah dapat membuat pesan persuasif yang dapat dilihat oleh masyarakat dan diharapkan tujuan iklan pelayanan masyarakat itu dapat tercapai.

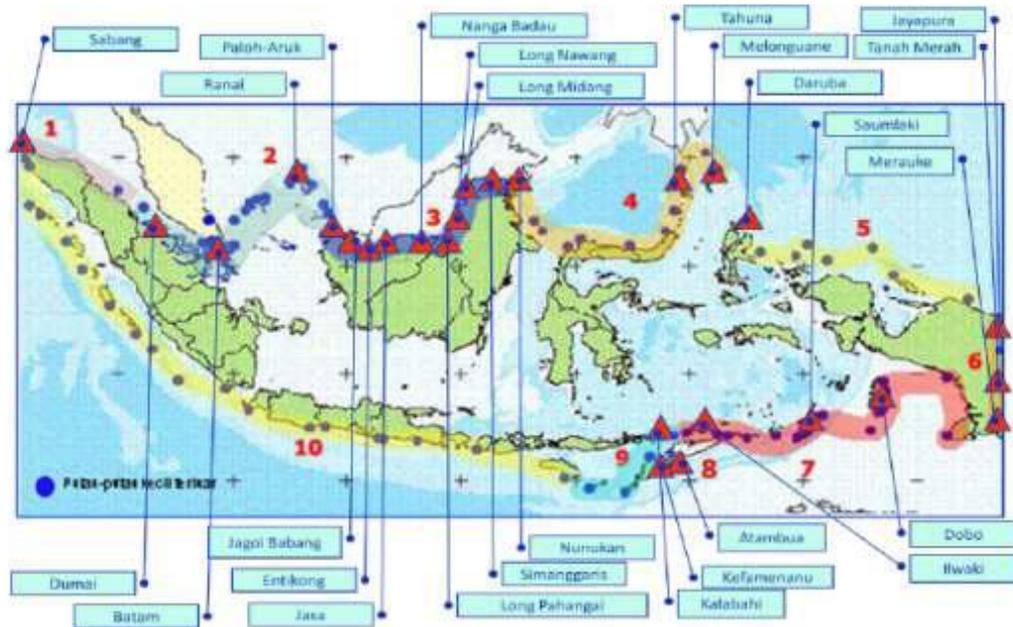
Untuk menerapkan kegiatan komunikasi agar dapat bersaing dan menunjukkan eksistensinya, sebuah organisasi atau instansi harus memiliki strategi komunikasi. Strategi adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan. (Arifin Anwar, 2009: 10).

Dalam mencapai tujuan tersebut strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Dengan demikian maka strategi komunikasi yang merupakan paduan perencanaan program komunikasi (*Communication Planning*) dengan manajemen komunikasi (*Communication Management*) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Saat ini banyak media komunikasi yang dapat dijadikan sebagai media (*channel*) untuk menyampaikan pesan (*message*) dari pemerintah kepada masyarakat, seperti televisi, radio, surat kabar, dan internet. Di antara keempat *channel* tersebut televisi menjadi pentransfer iklan yang paling ampuh bagi pemerintah. Maka tidak heran jika kita sering melihat iklan-iklan pelayanan masyarakat ditayangkan di televisi. Iklan pelayanan masyarakat mempunyai sifat yang berbeda, bersifat persuasif, koersif, informatif, dan argumentatif. Tujuannya pun bermacam-macam, politik, memperkenalkan budaya, memberitahukan kebijakan pemerintah, dan memperkenalkan inovasi untuk meningkatkan keakuratan dan dampak partisipasi masyarakat secara mandiri.

Indonesia adalah Negara yang luas akan daratan dan juga perairan, serta budaya yang dimilikinya sangat beragam. Dari sabang sampai merauke sangat membutuhkan informasi dan juga mempertahankan budaya dari daerah itu sendiri. Penulis disini akan mengangkat permasalahan yang terjadi di daerah Kepulauan Riau.

LOKASI 10 KAWASAN PERBATASAN DAN SEBARAN 26 KOTA PUSAT KEGIATAN STRATEGIS NASIONAL DI PERBATASAN



Sumber: Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008

Daerah Kepulauan Riau (Kepri) adalah salah satu Provinsi yang berdekatan dengan negara asing, yang dikenal sebagai daerah perbatasan. Kepri adalah salah satu provinsi daerah perbatasan dari 12 Provinsi di Indonesia, yang berbatasan dengan Negara Luar. Negara yang berdekatan dengan Kepulauan Riau adalah Singapura, Malaysia dan Vietnam. Pulau ini memiliki 2 Ibu Kota dan 5 Kabupaten. Ibu Kota terdiri dari Batam dan Tanjung Pinang. Sedangkan Kabupatennya adalah Bintan, Karimun, Natuna, Anambas dan Lingga. Daerah perbatasan adalah daerah yang sangat rawan sekali dengan dampak yang diakibatkan oleh media. Terlihat jelas sekali terpaan media atau pengaruh asing yang masuk wilayah Kepri. Melalui media penyiaran, terpaan itu mempengaruhi masyarakat dengan cepat. Salah satu contohnya adalah bagaimana cara berpikir, cara berpakaian, bahkan cara perilaku daerah perbatasan ini menunjukkan bahwa

sudah menceritakan terkikisnya adat kebudayaan khas Kepri sudah mulai nampak. Permasalahan dari berbagai daerah berbeda-beda. Salah satu permasalahannya adalah daerah perbatasan pulau terluar dari Kepri, anak-anak yang tinggal di pulau tersebut tidak hapal lagu nasionalnya sendiri (Indonesia Raya), bahkan polisi perbatasannya tidak mengenal presiden Indonesia dan yang lebih parahnya lagi, mereka sama sekali tidak dapat informasi dari Indonesia. Penjelasan ringkas diatas dapat dinyatakan bahwa rasa nasionalis sudah mulai luntur dan budaya khas dari daerah Kepri ini (Budaya Melayu) makin lama makin tenggelam.

Seperti rakyat Indonesia lainnya, maka rakyat Indonesia yang tinggal di daerah perbatasan juga berhak mendapatkan haknya, yaitu memperoleh informasi, pendidikan, hiburan melalui lembaga penyiaran Indonesia. Namun faktanya hingga saat ini Lembaga Penyiaran asing lebih dominan ketimbang Lembaga Penyiaran Indonesia di perbatasan, sehingga diperlukan advokasi dan edukasi bagi masalah penyiaran didaerah perbatasan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Daerah perbatasan republik Indonesia terbagi menjadi 2 yaitu; kabupaten/kota dikawasan perbatasan darat dan perbatasan laut. Dikawasan daratan terdiri dari 16 kabupaten. 18 untuk kawasan lautan.

Berbicara tentang penyiaran maka kita akan membicarakan juga badan atau lembaga yang tentunya mengawasi penyiaran (perizinan, konten program dan lain-lain). Penulis akan membahas peran KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) Kepulauan Riau dalam mendorong penyiaran perbatasan. Peran KPID memiliki wewenang untuk menata dan membenahi permasalahan mengenai

penyiaran terutama bertanggung jawab penuh terhadap penyiaran untuk daerah perbatasan ini. KPID memiliki 3 bidang yaitu bidang kelembagaan, bidang perizinan dan bidang pengawasan isi siaran. Pemecahan masalah ini terkait dengan kedaulatan negara, dimana membuat beberapa hal yang menimbulkan kekuatiran tersendiri. Salah satunya adalah tenggelamnya adat melayu yang menjadi budaya di Kepri.

Namun ini bukanlah hal yang mudah untuk membenahinya, secara perlahan namun pasti. Melalui pendekatan dan melakukan MOU (*Memorandum of Understanding*) terhadap lembaga masyarakat, contohnya LAM (Lembaga Adat Melayu) dan mengajak Lembaga Penyiaran ikut berperan serta dalam mempertahankan budaya melayu melalui penguatan program-program lokal yang mengangkat budaya Melayu. Dan juga melakukan sosialisasi kedaerah-daerah pulau terluar dari Kepri.

Hal ini menjadi penting karena pengaruh asing yang masuk membuat kecintaan kepada tanah air yang terasa sangat hilang. Contohnya, beberapa pulau yang berbatasan langsung dengan negara Singapura, Vietnam dan Malaysia mereka tidak hafal lagu Indonesia Raya, tidak mengetahui siapa Presiden kita dan yang paling menyedihkan adalah rasa nasionalisme yang hilang, pada bulan maret mereka saling mengucapkan selamat hari Guru, sedangkan di Indonesia hari Guru jatuh pada tanggal 25 November, sedangkan hari Guru di bulan maret adalah hari Guru dari negara malaysia. Dan juga banyak hal serupa yang terjadi akibat letak geografisnya yang dekat Indonesia dengan Singapura, Malaysia dan Vietnam.

Tahap awal dalam penelitian ini pengumpulan fakta atau informasi yang berkaitan dengan permasalahan perbatasan. Proses pertama adalah *Planning*

(perencanaan) sebuah perencanaan yang dilakukan KPID menyusun draft permasalahan di tiap bidangnya. Kedua, pelaksanaan yang didalamnya terdiri dari *Organizing* ini berkaitan dengan struktur organisasi sesuai tujuan organisasi dan *Actuating* (penggerak) ini adalah penggerak atau mempengaruhi dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama. Ketiga, *Controlling* ini dilakukan untuk mengetahui apakah setelah pelaksanaan dilakukan sudah berjalan baik atau belum. Kemudian yang terakhir adalah *Evaluating* ini sebagai proses akhir mengetahui apakah kegiatan berjalan efektif atau tidak.

Dalam menerapkan kegiatannya, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kepulauan Riau pada daerah-daerah terpencil dan perbatasan di Indonesia, pihak KPID Kepulauan Riau memiliki peran strategi agar tujuan dari kegiatan komunikasi tersebut dapat tercapai dengan baik. Dilatarbelakangi hal tersebutlah maka peneliti mencoba untuk meneliti dan mengetahui Strategi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dalam mendorong penyiaran perbatasan (Studi Kasus pada KPID Kepulauan Riau 2011-2014).

Masa jabatan KPID hanya tiga tahun, sehingga pelaksanaannya tidak dapat maksimal, perencanaan program perbatasan ini sebenarnya sudah direncanakan pada masa jabatan sebelumnya, namun karena masa jabatan tersebut sehingga dilanjutkan pada masa jabatan 2011-2014. Dan juga pada masa jabatan 2011-2014 ini sebagai perintis Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Perbatasan (KPIDP), sehingga penulis memilih periode 2011-2014 dalam penelitian ini.

1.2. Fokus Penelitian

Kepri merupakan salah satu dari daerah perbatasan yang memiliki berbagai masalah akibat bersebrangan dengan negara tetangga. Ini yang menjadi suatu keprihatinan bersama (KPI). Daerah perbatasan di Indonesia terdapat 12 provinsi. Kepri lah provinsi yang berbatasan dengan banyak negara, batasan wilayah timur dengan Malaysia Timur, bagian Barat dengan Singapura dan Malaysia dan bagian Utara berbatasan dengan Vietnam. Berbagai masalah timbul karena pengaruh asing yang masuk. Misalnya daerah perbatasan paling ujung, tidak hapal Indonesia Raya, melupakan ada Melayu yang ada, rasa nasionalis yang hilang (mengucapkan hari Guru di bulan Maret, bulan Maret adalah hari Guru di Malaysia), tayangan yang masuk tanpa sensor dan lain-lain.

KPI membentuk KPID perbatasan. Ini dilakukan sebagai bentuk keprihatinan sekaligus menjaga integritas negara. Peneliti mengambil atau meneliti data mengenai KPID Kepri di masa jabatan 2011-2014.

Strategi yang digunakan peneliti seperti halnya dengan strategi dalam bidang apapun, strategi komunikasi harus didukung oleh teori, karena teori merupakan pengetahuan berdasarkan pengalaman yang sudah diuji kebenarannya. Dalam melaksanakan tanggung jawab manajemennya, manager umum melaksanakan empat fungsi umumnya yaitu: *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Penggerak), *Controlling*, dan *Evaluating* (Morissan., 2004:132).

Penelitian ini memfokuskan bagaimana Strategi Komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPID) dalam Mendorong Penyiaran Perbatasan (Studi Kasus KPID Kepulauan Riau Periode 2011-2014)?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi Komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPID) dalam Mendorong Penyiaran Perbatasan (Studi Kasus KPID Kepulauan Riau Periode 2011-2014).

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan perumusan masalah yang berkaitan dengan masalah penelitian, peneliti akan mendapatkan informasi tentang hal-hal yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, aspek-aspek yang telah diteliti, prosedur-prosedur yang telah diterapkan, hasil dan hambatan yang ditemukan di dalam penelitian, dan perbedaan antara masalah yang hendak dipecahkan dengan masalah-masalah yang sudah dipecahkan orang lain. Peneliti dapat memetakan kedudukan masalah penelitiannya kedalam perspektif cakupan pengetahuan yang lebih luas, sehingga dapat membantu peneliti dalam menjelaskan pentingnya penelitian ini dilakukan.

Kajian teoritis berfungsi sebagai kajian secara kritis tetapi singkat tentang kekhususan, manfaat dan kelemahan dari penelitian sebelumnya (bukan sekadar kerangka teori atau hasil penelitian yang relevan saja), sehingga peneliti dapat memberikan pembenaran tentang pentingnya masalah yang akan diteliti.

Penelitian mengenai peran atau fungsi suatu lembaga pernah dilakukan oleh Haryono mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia pada tahun 2010. Dalam penelitiannya Haryono mencoba mengevaluasi program Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Bogor. Program pemberdayaan masyarakat ini dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Penelitian

menggunakan pendekatan *mixed methods* dan pengumpulan data secara kuantitatif (angket) dan kualitatif (wawancara mendalam) dengan rancangan penelitian sintesis antara evaluasi program model *CIPP* dan aspek pemberdayaan *Seven E*. Penelitian ingin menjawab dua pertanyaan pokok. *Pertama*, bagaimana efektifitas pemberdayaan masyarakat dalam PPK di Kabupaten Bogor. *Kedua*, apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan PPK.

Pada penelitian tersebut mendapatkan temuan: *Pertama*, evaluasi program selama ini lebih pada aspek teknis dan ekonomis dan tidak bermuatan pemberdayaan. *Kedua*, penetapan jenis program sesuai konteks, input program belum mencukupi kebutuhan SPP. *Ketiga*, faktor penghambat pemberdayaan, tidak adanya pendampingan khusus bagi keluarga miskin, dan tidak adanya jaminan keberlanjutan program. *Keempat*, untuk mencapai hasil pemberdayaan maksimal perlu penerapan konsep pemberdayaan *Seven E*, sehingga transformasi sosial akan berlangsung.

Sementara Marroli J Indarto seorang mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia melakukan penelitian dengan judul : Manajemen Komunikasi Pemerintahan Dalam Kebijakan Transparansi Informasi (Studi Evaluasi Komunikasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Kementrian Komunikasi dan Informatika). Dimana dibahas dengan proses empat langkah metode manajemen Cutlip Center dan Brown. Metode transpansi Rawlin dan teori pengait yaitu teori pemangku kepentingan. Metode penelitian menggunakan paradigma positif dan perspektif manajemen pada pendekatan kualitatif studi kasus. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa komunikasi pemerintah sudah menjalankan dengan

menggunakan manajemen dalam menganalisa dimensi transparansi dan hasilnya belum terlalu maksimal. Disimpulkan bahwa manajemen komunikasi pemerintah harus mempunyai perencanaan yang komprehensif dan terstruktur.

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

No	Penulis dan Judul	Tujuan Penelitian	Teori dan Metode	Hasil	Kritik
1.	H a r y o n o Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Departemen Ilmu Administrasi Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia 2010 Studi Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat : Kasus Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Di Kab Bogor	Mengetahui rancangan program model CIPP serta aspek pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Bogor	Dengan rancangan penelitian sintesis antara evaluasi program model <i>CIPP</i> dan aspek pemberdayaan <i>Seven E</i> , penelitian ini ingin menjawab dua pertanyaan pokok. <i>Pertama</i> , efektifitas pemberdayaan masyarakat dalam PPK. <i>Kedua</i> , apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan PPK.	Penelitian mendapatkan temuan: evaluasi program selama ini lebih pada aspek teknis dan ekonomis dan tidak bermuatan pemberdayaan. Penetapan jenis program sesuai konteks, input program.	Keberlanjutan program pemberdayaan akan tercapai jika aspek pengembangan kemandirian dilaksanakan pada evaluasi dan harus diliat pula program yang dikembangkan oleh pemerintah pusat

2.	<p>Marroli J. Indarto Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu politik Program Studi Ilmu Komunikasi Kekhususan Manajemen Komunikasi Universitas Indonesia 2012 Manajemen Komunikasi Pemerintahan Dalam Kebijakan Transparasi Informasi. (Studi Evaluasi Komunikasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Kementrian Komunikasi dan Informatika)</p>	<p>Untuk mengetahui kebijakna pemerintah dalam transparansi informasi di Kementrian Komunikasi dan Informatika</p>	<p>Manajemen komunikasi dibahas dengan proses empat langkah metode manajemen Cutlip Center dan Brown. Metode transpansi Rawlin dan teori pengait yaitu teori pemangku kepentingan.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukan bahwa komunikasi pemerintah sudah merupakan metode manajemen dalam menganalisa dimensi transparansi dan hasilnya belum maksimal</p>	<p>Harus ada strategi komunikasi pemerintah dan perencanaan dalam melakukan identifikasi masalah</p>
3.	<p>Josephian Vivick Tjungkung 55208110003</p>	<p>Untuk mengetahui strategi komunikasi yang digunakan kampung bebas</p>	<p>Teori strategi komunikasi pemberdayaan masyarakat, teori</p>	<p>Bahwa didapati perspektif pemasaran sosial bisa menjadi</p>	<p>Harus ditampilkan pula perencanaan</p>

	Strategi Komunikasi Pemasaran Sosial Kampung Bebas Narkoba Oleh Badan Narkotika Nasional (Studi Kasus Pemberdayaan Masyarakat di Kompleks Permata Kampung Ambon Kelurahan Kedaung Kali Angke Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat 2010	narkoba yang dilakukan oleh BNN	kognisi sosial dan perubahan tingkah laku, teori pemasaran sosial untuk pemberdayaan masyarakat dan teori analisis faktor penentu keberhasilan pemasaran sosial	acuan pelaksanaan evaluasi pemberdayaan masyarakat. Strategi yang digunakan adalah strategi komunikasi interaktif dengan lebih banyak melibatkan dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat.	pemberdayaan masyarakat oleh Badan Narkotika Nasional
4.	Adhi Pramoto 55208110007 2011 Strategi Corporate Branding Lembaga Pemerintahan Dalam Menciptakan Nilai Lembaga. (Studi Kasus Strategi Corporate Branding Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional)	Mengetahui bagaimana pemerintah dalam menciptakan nilai kelembagaan dalam strategi corporate	Teori brand, teori corporate branding dan strategi, teori pembentukan budaya lembaga pemerintah dan pembentukan image lembaga pemerintah.	Strategi <i>corporate branding</i> yang dikembangkan didasarkan pada keinginan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat mewujudkan visi LAPAN menguatkan komunikasi publik berdasarkan standar mutu	Harus ditampilkan pula hasil evaluasi dari meningkatkan pelayanan masyarakat mewujudkan visi LAPAN menguatkan komunikasi publik

				dan pelayanan	
--	--	--	--	---------------	--

2.1.2. Kajian Teoritis

2.1.2.1. Komunikasi

Komunikasi sebagai kata yang abstrak, pada dasarnya sulit didefinisikan. Komunikasi memiliki sejumlah arti. Para pakar telah membuat banyak upaya untuk mendefinisikan komunikasi. Namun, menetapkan astu definisi tunggal terbukti tidak mungkin dan tidak berguna, utamanya melihat pada berbagai ide yang dibawa dalam istilah itu.

Komunikasi adalah penyebaran informasi, ide-ide, sikap-sikap atau emosi dari seseorang atau kelompok yang lain terutama melalui simbol-simbol. Dalam pengertian umum komunikasi, sebuah sumber dan mempengaruhi yang lain, si tertuju dengan memanipulasi simbol-simbol *alternative* yang dapat disebarkan melalui saluran yang menghubungkan.

Proses komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain. Pikiran bisa berupa gagasan, perasaan bisa berupa keyakinan, kepastian, keragu-raguan, kekhawatiran, kemarahan dan keberanian.

Komunikasi dapat diartikan usaha penyampaian pesan antar manusia. Terdapat tiga unsur utama yang dapt kita bahas guna mengindetifikasi apakah suatu peristiwa itu merupakan bagian dari komunikasi yang kita kaji atau bukan. Ketiga unsur itu adalah (1) usaha, (2) penyampaian pesan, (3) antarmanusia.

Dance dan Larson mengindentifikasi tiga dimensi konseptual penting yang mendasari perbedaan dari ke-126 definisi temuannya itu. (1) **Tingkat obsevasi atau derajat keabstrakannya:** yang bersifat umum, misalnya definisi yang

menyatakan bahwa komunikasi adalah proses menghubungkan satu bagian dengan bagian lainnya dalam kehidupan. (2) **Tingkat kesengajaan** : yang mensyaratkan kesengajaan, misalnya definisi yang menyatakan bahwa komunikasi adalah situasi-situasi yang memungkinkan suatu sumber mentransisikan suatu pesan kepada seorang penerima dengan disadari untuk mempengaruhi perilaku penerima. (3) **Tingkat keberhasilan dan diterimanya pesan** : yang menekankan keberhasilan diterimanya pesan, misalnya definisi yang menyatakan bahwa komunikasi adalah proses pertukaran informasi untuk mendapatkan saling pengertian. (Vardiansyah, Dani. *Pengantar Ilmu Komunikasi*, 2004).

2.1.2.2. Peran Komunikasi dalam Pembangunan

Anggapan masyarakat selama ini adalah bahwa komunikasi tidaklah terlalu penting dalam proses pembangunan. Hal ini disebabkan karena teori-teori pembangunan yang dikemukakan para pemikir ekonomi secara umum hanya dikembangkan dalam tradisi teori pertumbuhan ekonomi, yaitu berisi gambaran mengenai proses perubahan ekonomi yang telah berlangsung di negara-negara maju. Titik tolak teori-teori tersebut selalu bermula dari pemberdayaan faktor-faktor utama produksi, yakni tanah, modal, dan tenaga kerja. Dengan kata lain amat jarang pembahasan yang secara eksplisit mencantumkan tentang komunikasi. Pada beberapa kasus pembahasan komunikasi dalam rangka pembangunan hanya ditempatkan sebagai “hiasan bibir” namun pernyataan-pernyataan tersebut lantas beralih ke teori pertumbuhan ekonomi melulu, seakan-

akan itulah penjelasan yang lengkap dan memadai bahkan ironisnya komunikasi tampak justru ditempatkan sebagai sambungan dari uraian tentang “transportasi”.

Padahal, menurut Frey (dalam Nasution, 2006:81) “kalau diamati dengan teliti, sebenarnya banyak fase dari pertumbuhan ekonomi menurut teori-teori pembangunan tersebut yang merupakan tempat komunikasi memainkan peranan penting”.

Frey memberikan contoh mengenai sistem harga (pricing system) yang dapat dilihat sebagai suatu sistem komunikasi yang terspesialisasikan, yang menyediakan informasi esensial bagi perhitungan yang rasional untuk perencanaan maupun acuan bagi para pembuat keputusan ekonomi di semua tingkatan.

Frey mengusulkan agar dalam pembahasan tentang pembangunan perlu dihubungkan dengan analisa yang lebih mendalam pada efek komunikasi yang memiliki relevansi dengan pembangunan. Dikemukakan Frey (dalam Nasution, 2006:83) “bahwa sementara ongkos modernisasi boleh jadi demikian besarnya, namun sampai tingkat tertentu dapat diatasi melalui sistem komunikasi”.

Berkaitan dengan tingkat analisisnya, Hedebro (dalam Nasution, 2006:79) mengidentifikasi tiga aspek komunikasi dan pembangunan, yakni :

1. Pendekatan yang berfokus pada pembangunan suatu bangsa, dan bagaimana media massa dapat menyumbang dalam upaya tersebut. Di sini, politik dan fungsi-fungsi media massa dalam pengertian yang umum merupakan objek studi, sekaligus masalah-masalah yang menyangkut struktur organisasional dan pemilikan, serta kontrol terhadap media. Untuk studi-studi jenis ini, sekarang

digunakan istilah kebijakan komunikasi, dan merupakan pendekatan yang paling luas dan bersifat general (umum).

2. Pendekatan yang juga dimaksudkan untuk memahami peranan media massa dalam pembangunan nasional, namun jauh lebih spesifik. Media dilihat sebagai pendidik atau guru, idenya adalah bagaimana media massa dapat dimanfaatkan untuk mengajarkan kepada masyarakat bermacam keterampilan, dan dalam kondisi tertentu mempengaruhi sikap mental dan perilaku mereka. Persoalan utama dalam studi jenis ini adalah, bagaimana media massa dapat digunakan secara paling efisien untuk mengajarkan pengetahuan tertentu bagi masyarakat suatu bangsa.
3. Pendekatan yang berorientasi kepada perubahan yang terjadi pada suatu komunitas lokal atau desa. Konsentrasinya adalah pada memperkenalkan ide-ide baru, produk dan cara-cara baru, dan penyebarannya di suatu desa atau wilayah. Studi jenis ini mendalami bagaimana aktivitas komunikasi dapat dipakai untuk mempromosikan penerimaan yang luas akan ide-ide dan produk baru.

Lebih lanjut Hedebro mengemukakan 12 (dua belas) peran yang dapat dilakukan komunikasi dalam pembangunan, sebagai berikut:

1. Komunikasi dapat menciptakan iklim bagi perubahan dengan membujuk nilai-nilai, sikap mental, dan bentuk perilaku yang menunjang modernisasi.
2. Komunikasi dapat mengajarkan keterampilan-keterampilan baru, mulai dari baca-tulis ke pertanian, hingga kepada keberhasilan lingkungan, hingga reparasi mobil.

3. Media massa dapat bertindak sebagai pengganda sumber-sumber daya pengetahuan.
4. Media massa dapat mengantarkan pengalaman-pengalaman yang seolah-oleh dialami sendiri, sehingga mengurangi biaya psikis dan ekonomis untuk menciptakan kepribadian yang *mobile*.
5. Komunikasi dapat meningkatkan aspirasi yang merupakan perangsang untuk bertindak nyata.
6. Komunikasi dapat membantu masyarakat menemukan norma-norma baru dan keharmonisan di tengah kehidupan.
7. Komunikasi dapat membuat orang lebih condong untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan di tengah kehidupan bermasyarakat.
8. Komunikasi dapat mengubah struktur kekuasaan pada masyarakat yang bercirikan tradisional, dengan membawakan pengetahuan kepada massa. Mereka yang memperoleh informasi akan menjadi orang yang berarti dan para pemimpin tradisional akan tertantang oleh kenyataan bahwa ada orang-orang lain yang juga mempunyai kelebihan dalam hal memiliki komunikasi.
9. Komunikasi dapat menciptakan rasa kebangsaan sebagai sesuatu yang mengatasi kesetiaan-kesetiaan lokal.
10. Komunikasi dapat membantu mayoritas populasi untuk menyadari pentingnya arti mereka sebagai warga negara, sehingga dapat membantu meningkatkan aktivitas politik.
11. Komunikasi dapat memudahkan perencanaan dan implementasi program-program pembangunan yang berkaitan dengan kebutuhan penduduk.

12. Komunikasi dapat membuat pembangunan ekonomi, sosial, dan politik menjadi suatu proses yang berlangsung sendiri (s

Dalam kaitannya dengan pembangunan nasional suatu bangsa, Schramm (dalam Nasution, 2006:85) merumuskan tugas pokok komunikasi sebagai berikut:

1. Menyampaikan kepada masyarakat, informasi tentang pembangunan nasional, agar mereka memusatkan perhatian pada kebutuhan akan perubahan, kesempatan dan cara mengadakan perubahan, sarana-sarana perubahan, dan membangkitkan aspirasi nasional.
2. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil bagian secara aktif dalam proses pembuatan keputusan, memperluas dialog agar melibatkan semua pihak yang akan membuat keputusan mengenai perubahan, memberikan kesempatan kepada para pimpinan masyarakat untuk memimpin dan mendengarkan pendapat rakyat kecil, dan menciptakan arus informasi yang berjalan lancar dari bawah ke atas.
3. Mendidik tenaga kerja yang diperlukan pembangunan, sejak orang dewasa, hingga anak-anak, sejak pelajaran baca tulis, hingga keterampilan teknis yang mengubah hidup masyarakat.

Analisa yang paling orisinal dan provokatif adalah komentar Mc Clelland yang mengaitkan komunikasi dengan pembangunan ekonomi, yakni perihal pentingnya opini publik bagi pembangunan. Menurut Mc Clelland (dalam Nasution, 2006:84) bahwa :

Dalam pembangunan ekonomi kekuatan yang merangkul masyarakat adalah bergerak dari tradisi yang melembaga, ke opini publik, yang dapat mengakomodir perubahan, dan hubungan interpersonal yang spesifik serta fungsional.

Dari pengertian tersebut dapat dikemukakan bahwa cara-cara yang kaku dan telah tertentu dalam berhubungan dengan orang lain, diganti dengan pola-pola yang lebih luwes yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus. Masyarakat kemudian menjadi lebih terbuka dan efektif, karena individu-individu sebagai anggota masyarakat dapat berkomunikasi dengan orang lain untuk keperluan yang spesifik. Keadaan seperti ini membuat orang berpartisipasi dengan yakin karena hubungan atau komunikasi tersebut dikendalikan oleh opini-opini dan harapan “orang lain”.

2.1.2.3. Strategi Komunikasi

Kata strategi selalu diartikan atau disejajarkan dengan kata cara strategi kemudian berarti cara untuk menyelesaikan sesuatu. Dalam konteks ini padanan kata cara untuk strategi tidaklah melulu salah karena memang strategi adalah cara. (John P. Simanjuntak, 2003:78).

Hal yang membedakan antara strategi dan cara dalam arti harafiah adalah bahwa strategi yang mempunyai arti luas dan kompleks. Kata cara dapat dipergunakan dalam banyak kondisi tetapi strategi adalah cara untuk menyelesaikan sesuatu secara jangka panjang. Ini kemudian berarti bahwa strategi adalah kegiatan dalam dilakukan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ada atau aksi dalam organisasi untuk mencapai *performance* terbaiknya.

Dalam arti umum kata strategi selalu berarti mengurus sesuatu secara besar, luar, panjang dan menyeluruh. Dalam organisasi atau perusahaan misalnya, *strategic planning* adalah perencanaan organisasi untuk menuju suatu titik yang

dikenal dengan nama visi, misi dan *objective* adalah sesuatu tujuan jangka panjang.

Strategi pada hakekatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai suatu tujuan akan tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Demikian pula dengan strategi komunikasi yang merupakan paduan perencanaan program komunikasi (*communication planning*) dengan manajemen komunikasi (*communication management*) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi tindakan mengkonsentrasikan atas penyesuaian dan adaptasi di dalam organisasi. Kesempatan untuk menerapkan beberapa perubahan bagaimanapun mensyaratkan bahwa baik manajemen puncak dan praktisi mendefinisikan humas sebagai suatu yang lebih penting dibandingkan publisitas dan mengkonsumsikan secara *persuasive* (halus).

Membangun strategi komunikasi korporasi dan menyiapkan strategi organisasi yang efektif:

a. Membangun Strategi Komunikasi Korporasi

Dalam hal ini lebih lanjut mengembangkan variabel-variabel dan menawarkan mereka situasinya dan melekat bagaikan mereka yang mengerjakannya dalam prakteknya.

b. Menyiapkan Strategi Organisasi yang Efektif

Bagian pertama dari strategi korporasi berhubungan ke organisasi itu sendiri. Tiga (3) subjek dari suatu strategi organisasi termasuk:

1) Menentukan sasaran untuk informasi komunikasi

- 2) Menentukan sumber daya apa yang tersedia untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut dan
- 3) Mendiagnosa reputasi organisasi

Strategi komunikasi disini akan berkaitan dengan bagaimana mewujudkan gagasan sehingga bisa mencapai objektif yang diterapkan. Dalam strategi ini biasanya dinyatakan apa yang dilakukan. Tentukan khalayak mana yang akan dijangkau oleh kegiatan komunikasi sejalan dengan objektif yang sudah ditetapkan. Dalam penyusunan strategi ini, penting untuk memprioritaskan publik organisasi. Namun, dengan tidak melupakan publik *intermediary* (berpengaruh) yang akan membantu mengkomunikasikan pesan.

Pesan yang disusun pun harus konsisten dengan objektif. Tema yang baik adalah tema yang jelas, langsung, relevan, aktual dan jujur. Selain itu bisa juga kreatif, dramatis atau bernilai berita. Harap diingat tema itu karena tidak sama dengan slogan. Disini, dipertimbangkan bagaimana pesan itu disampaikan. Apakah ke publik, media interaktif, media yang terkontrol, komunikasi tatap muka atautkah menyelenggarakan kegiatan atau membuat kegiatan? Media dan *event* yang dipilih dilakukan dengan mempertimbangkan khalayak yang dijangkau melalui kegiatan komunikasi tersebut.

Perencanaan adalah hakekat dasar dari sebuah manajemen strategi. Strategi diartikan sebagai rencana yang disatukan menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keunggulan perusahaan dengan tantangan terhadap lingkungannya dan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat tercapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh perusahaan (Lawrence R, William F. Glueck, 2005:12).

Strategi komunikasi, baik secara makro atau pun secara mikro, memiliki fungsi menyebarluaskan pesan komunikasi yang bersifat komunikatif, persuasif dan instruktif secara sistematis kepada sasaran untuk memperoleh hasil optimal. Strategi komunikasi harus mampu menunjukkan bagaimana operasionalisasinya secara praktis dilakukan (Onong Uchjana, 2006:32).

Strategi merupakan keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan. Jadi dalam merumuskan strategi komunikasi, selain diperlukan perumusan tujuan yang jelas, juga memperhitungkan kondisi dan situasi khalayak (Anwar Arifin, 2004:59).

Strategi komunikasi secara makro (*planned multy media strategic*) maupun secara mikro (*single communication medium strategic*) mempunyai fungsi ganda yaitu:

- a) Menyebarluaskan pesan komunikasi yang bersifat informatif, persuasif dan instruktif secara sistematis kepada sasaran untuk memperoleh hasil yang optimal.
- b) Menjembatani kesenjangan (*cultural gap*) akibat kemudahan diperolehnya dan kemudahan dioperasionalkannya media massa yang begitu ampuh pengaruhnya bagi masyarakat.

Sedangkan definisi lengkap strategi komunikasi adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya (Onong Uchjana Effendy, 2004:32).

Dengan demikian strategi komunikasi merupakan perpaduan dari perencanaan komunikasi (*communications management*) untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai suatu tujuan strategi komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana operasionalnya secara taktis harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan (*approach*) bisa berbeda sewaktu-waktu bergantung dari situasi dan kondisi.

Seperti halnya dengan strategi dalam bidang apapun, strategi komunikasi harus didukung oleh teori, karena teori merupakan pengetahuan berdasarkan pengalaman yang sudah diuji kebenarannya. Dalam melaksanakan tanggung jawab manajemennya, manager umum melaksanakan empat fungsi umumnya yaitu:

1. *Planning* : Perencanaan mencakup kegiatan penentuan tujuan (*objectives*) media penyiaran serta mempersiapkan rencana dan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam perencanaan harus diputuskan “apa yang dilakukan, kapan melakukannya, bagaimana melakukannya dan siapa yang melakukannya”.
2. *Organizing* : Merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki dan lingkungan yang melingkupinya. Dua aspek utama proses penyusunan struktur organisasi adalah departementalisasi dan pembagian kerja.
3. *Actuating* : Memberikan pengaruh (penggerak) mencakup usaha untuk mempengaruhi *influencing* tertuju pada upaya untuk merangsang antusiasme karyawan untuk melaksanakan tanggung jawab mereka secara

efektif. Kegiatan mengarahkan dan mempengaruhi empat kegiatan penting: pemberian motivasi, komunikasi, kepemimpinan dan pelatihan.

4. *Controlling* : Suatu proses untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan organisasi atau perusahaan sudah tercapai atau belum, untuk mengetahui bahwa kegiatan berjalan dengan baik dan tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari rancangan semula. Maka diperlukannya koreksi dan evaluasi.
5. *Evaluating* : Dalam suatu program acara mengevaluasi setiap program acara yang sudah berlangsung, (Morissan., 2004:132)

Tambahan pertanyaan tersebut dalam strategi komunikasi sangat penting, karena pendekatan terhadap efek yang diharapkan dari suatu kegiatan komunikasi bisa berjenis-jenis, (Onong Uchjana Effendy, 2004:302) yakni :

1. Menyebarkan informasi
2. Melakukan persuasi
3. Melaksanakan instruksi

Dalam proses penerapan strategi komunikasi menurut Lasswell dan bagaimana cara kita berkomunikasi (*how to communicated*), kita bisa mengambil salah satu dari dua tatanan (Onong Uchjana Effendy, 2004:302) dibawah ini:

- a. Komunikasi tatap muka (*face to face communication*)
- b. Komunikasi bermedia (*mediated communication*)

Jadi strategi merupakan perencanaan yang dibuat secara cermat dan sistematis terhadap suatu perusahaan yang dihadapi untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Strategi menunjukkan bagaimana sebuah rencana dioperasionalisasikan dengan menunjukkan arah bagaimana seharusnya tujuan

dapat dicapai. Strategi komunikasi merupakan paduan dari perencanaan program komunikasi dengan manajemen komunikasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.1.2.4. Komunikasi Massa

Komunikasi massa menjadi salah satu komunikasi terbesar yang melibatkan masyarakat banyak. Ciri-ciri dari komunikasi massa yaitu komunikasi massa berlangsung satu arah (*one way communication*), komunikator pada komunikasi massa melembaga yaitu suatu institusi atau organisasi, pesan komunikasi massa bersifat umum, media komunikasi massa menimbulkan keserempakan karena kemampuannya yang dapat menyebar dengan cepat kepada khalayak dalam menerima pesan-pesan yang disebarkan, dan komunikasi massa bersifat heterogen.

Prof. Onong Uchyana Effendy menyatakan suatu paradox dari heterogenitas komunikasi dalam komunikasi massa ialah pengelompokan komunikasi harus mempunyai minat yang sama terhadap media massa, terutama khusus dari isi penyiaran serta mempunyai kesamaan pengertian kebudayaan dan lain-lain.

Menurut Bittner komunikasi massa adalah sebagai berikut : *Mass Communication is message communicated through a mass medium to a large number of people.* Komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang.

Gerbner mendefinisikan komunikasi massa lebih rinci yang menyebutkan komunikasi massa adalah produksi dan distribusi yang berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang kontinu serta paling luas dimiliki orang dalam masyarakat industri.

Defenisi komunikasi massa yang diungkapkan oleh ahli komunikasi tersebut pada prinsipnya sama, bahkan antara satu defenisi yang satu dengan yang lain dinggap saling melengkapi. Melalui defenisi tersebut kita dapat mengetahui karakteristik komunikasi massa, yaitu sebagai berikut :

a. Komunikator terlembagakan

Dengan mengingat kembali pendapat gerbner bahwa komunikasi massa melibatkan lembaga, kita bisa membayangkan bahwa proses penyampaian pesan tidak hanya dilakukan oleh satu orang melainkan banyak orang dengan keahlian yang berbeda-beda, tekhnologi yang cukup memadai dan dana yang cukup besar.

b. Pesan bersifat umum

Komunikasi massa bersifat terbuka, artinya komunikasi massa itu ditunjukkan untuk semua orang dan tidak ditujukan untuk orang atau sekelompok orang tertentu. Oleh karena itu, pesan komunikasi massa bersifat umum.

c. Komunikannya anonim dan heterogen

Dalam komunikasi massa, komunkator tidak mengenal komunikannya (anonim) karena proses komunikasinya menggunakan media dan tidak bertatap muka. Selain anonim, komunikan dalam komunikasi massa juga heterogen karena terdiri dari berbagai lapisan masyarakat yang berbeda,

yang dapat dikelompokkan berdasarkan faktor usia, jenis kelamin, agama, pendidikan, pekerjaan, latar belakang budaya, tingkat ekonomi dan sebagainya.

d. Media massa menimbulkan keserempakan

Kelebihan komunikasi massa dibandingkan dengan komunikasi lainnya adalah jumlah sasaran khalayak atau komunikan yang bisa dicapai relative banyak dan tidak terbatas, bahkan komunikan yang banyak tersebut secara serempak dalam waktu yang bersamaan memperoleh pesan yang sama pula.

e. Komunikasi mengutamakan isi dari pada hubungan

Setiap komunikasi melibatkan unsur isi dan hubungan sekaligus. Dalam komunikasi antarpersona unsur hubungan sangat penting, sedangkan dalam komunikasi massa yang penting adalah unsur isi. Dalam komunikasi massa pesan harus sedemikian rupa berdasarkan sistem tertentu dan disesuaikan dengan karakteristik media massa yang akan digunakan.

f. Komunikasi massa bersifat satu arah

Komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media massa, sehingga komunikator tidak dapat melakukan kontak langsung dengan komunikannya. Komunikator aktif menyampaikan pesan, komunikan pun aktif menerima pesan tetapi diantara keduanya tidak dapat berdialog secara langsung

g. Stimulasi alat indra “terbatas”

Dalam komunikasi massa, stimulasi alat indra bergantung pada jenis media massa. Pada surat kabar dan majalah komunikasi hanya melihat, pada radio komunikasi hanya mendengar sedangkan pada televisi komunikasi hanya melihat dan mendengar

h. Umpan balik tertunda

Umpan balik (*feed back*) yang diberikan oleh komunikasi pada komunikator dalam komunikasi massa tidak dapat diterima secara langsung.

Komunikasi massa memiliki fungsi sebagai berikut (Burhan Bungin, 2007:35) :

a. Fungsi menyiarkan informasi (*to inform*)

Merupakan fungsi pers yang pertama dan utama khalayak menerima informasi mengenai berbagai hal yang terjadi, gagasan atau pikiran orang lain dan apa yang dipikirkan orang lain.

b. Fungsi mendidik (*to educate*)

Fungsi ini sebagai sarana pendidikan masa sebagai penambah pengetahuan kepada khalayak.

c. Fungsi menghibur (*to entertain*)

Media merupakan sarana yang paling mudah dan murah untuk mendapatkan hiburan terutama pesawat televisi, yang menghadirkan berbagai hiburan musik, sinetron, live musik, dan lain-lain.

d. Fungsi mempengaruhi (*to persuasive*)

Setiap tayangan dapat mempengaruhi khalayak baik tayangan hiburan maupun informasi contohnya kemajuan taknologi dan fashion.

2.1.2.5. Televisi

Televisi sebagai media massa elektronik yaitu audio visual yang dapat didengarkan dan dilihat bila siaran, dapat didengar dan dilihat kembali bila diputar kembali. Televisi juga merupakan media yang memiliki daya rangsang sangat tinggi, elektrik, mahal dan daya jangkauan besar.

Televisi dari media komunikasi yang ada, televisilah yang paling berpengaruh pada kehidupan manusia. Televisi mengalami perkembangan secara dramatis, terutama melalui pertumbuhan televisi kabel. Transmisi program televisi kabel menjangkau seluruh pelosok negeri dengan bantuan satelit dan diterima langsung pada layar televisi di rumah dengan menggunakan *wire* atau *microwave* (*wireless cables*) yang membuka tambahan saluran pemirsa. Televisi tambah marak lagi setelah dikembangkan *Direct Broadcast Satelit* (DBS). (Elvinaro, 2005:19).

Menurut **Agee, et al**, siaran percobaan televisi di Amerika Serikat dimulai pada tahun 1920-an. Para ilmuwan terus mengembangkan teknologi komunikasi dalam bentuk televisi ini. Antara tahun 1890 dan 1920, sekelompok ilmuwan Inggris, Perancis, Rusia dan Jerman menyarankan pengembangan teknik-teknik transmisi gambar televisi. **Jhon L. Baird**, sebagai penemu dari televisi di London tahun 1926. Sejak itu televisi dapat menayangkan gambar-gambar hidup seperti film layar lebar. Sementara itu, *the English Derby* membuat *movie house* (

film televisi) pada tahun 1923. *British Broadcast orporation* (BBC) merupakan televisi secara teratur pada 2 Nopember 1936.

Tahun 1948 merupakan tahun penting dalam dunia pertelevisian, dengan adanya perubahan dari televisi eksperimen ke televisi komersial di Amerika. Karena perkembangan televisi yang sangat cepat, dari waktu ke waktu media ini memiliki dampak terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari.

Secara bertahap layar televisi berkembang dari diagonal 7 inci kemudian 12, 17, 24, sampai 39 inci. Penonton televisi kini lebih banyak selektif. Jam tayang televisi bertambah. Penerimaan programnya mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Sistem penyampaian program lebih berkembang lagi. Kini sedikitnya terdapat lima metode penyampaian program televisi yang telah dikembangkan. Seperti : *Over-the-air*, *Cable*, *Digital cable*, *Wireless cable*, dan *Direct Broadcast Satelite* (DBS).

2.1.2.6. Televisi Sebagai Saluran Media Penyiaran

Dari semua media komunikasi yang ada, televisilah yang paling berpengaruh pada kehidupan manusia. Dengan televisi kita mendapatkan hiburan, pendidikan, berita dan lain-lain yang disajikan stasiun televisi. Media ini cukup ampuh untuk membuat khalayak mengalami metamorfosa yang sangat cepat, perkembangannya media televisi berpengaruh sekali terhadap perilaku khalayak yang menyaksikan. Televisi dikatakan sangat berpengaruh terhadap audiens karena televisi memberikan banyak efek kepada audiens misalnya : berubahnya gaya hidup, cara berpakaian, cara bicara, pola pikir, tingkah laku bahkan juga gaya bahasa.

2.1.2.7. Fungsi Televisi

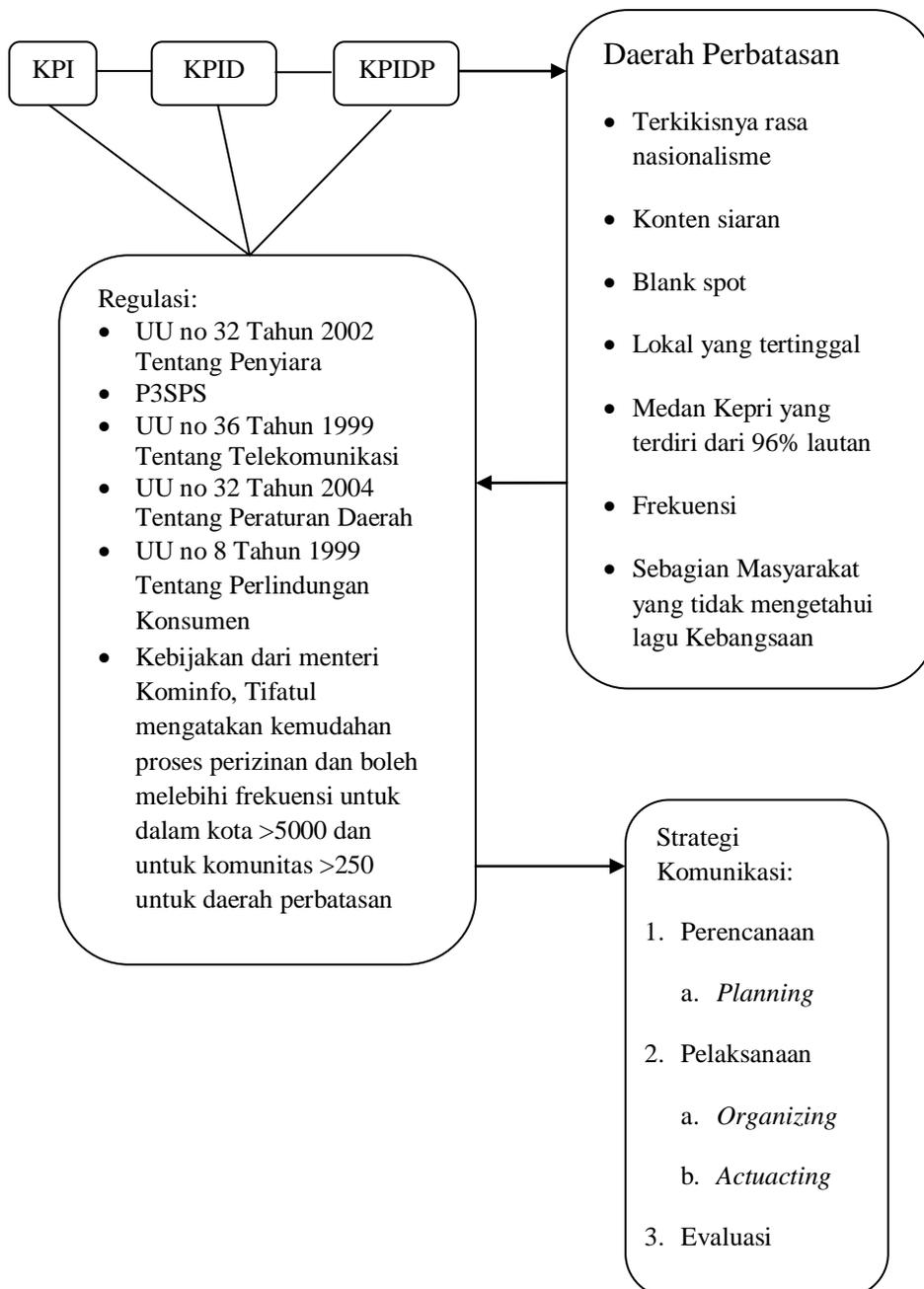
Fungsi televisi sama dengan fungsi media massa lainnya (surat kabar,dan radio siaran), yakni member informasi, mendidik, menghibur dan membujuk. Tetapi fungsi menghibur lebih dominasi pada media televisi sebagaimana hasil penelitian-penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi UNPAD, yang menyatakan bahwa pada umumnya tujuan utama khalayak menonton televisi adalah untuk memperoleh hiburan, selanjutnya untuk memperoleh informasi. (Elvinaro, 2005:128).

2.2. Kerangka Pemikiran

Informasi bertujuan untuk memberi tahu kepada khalayak mengenai berita yang terjadi seluruh wilayah bahkan dunia. Hak ini lah yang harus tetap dijaga oleh negara. Setiap warga negara berhak mendapatkan informasi secara merata, baik secara lisan maupun tulisan sesuai dengan UUD 1945. Pemerataan informasi ini yang banyak menimbulkan berbagai masalah, terutama di daerah atau provinsi perbatasan yang memiliki daerah blank spot, konten lokal yang kurang mendapat perhatian dari masyarakat, masalah frekuensi juga menjadi masalah pokok bagi lembaga penyiaran komunitas, swasta maupun publik, terkikisnya rasa nasionalisme serta medan Kepulauan Riau yang terdiri dari 94% adalah lautan dan 4% adalah daratan, itu menjadi hal utama dalam permasalahan pembagian informasi yang tidak merata ini didaerah perbatasan dalam hal ini adalah Kepulauan Riau. Di Indonsia memiliki Lembaga Negara yang mengatur tentang penyiaran, yaitu KPI (Komisi Penyiaran Indonesia). KPI Pusat terletak di Jakarta.

Lalu, disetiap daerah (Provinsi) diwakili oleh KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah). Masalah yang timbul dari penyiaran tidaklah sedikit dan tidak mudah untuk diselesaikan. Indonesia yang memiliki ribuan ragam budaya yang sering menimbulkan masalah tertentu. Terkadang ada beberapa kebudayaan yang tidak cukup baik dimata kebudayaan lain. Misalnya, TVRI pada saat itu memutar film dokumenter mengenai suku di Papua. Bagian dada para wanita di suku tersebut terekspose. Para wanita Papua yang melihat scene tersebut menanggapinya biasa saja, tapi orang yang melihat scene tersebut sangat terganggu. Kemudian terdapat scene yang memperlihatkan bagian tengkuk wanita suku tersebut, bagi masyarakat umum bagian tengkuk adalah hal yang biasa tapi tahukah bahwa ternyata penonton orang-orang Papua marah besar melihat scene tersebut karena menurut mereka bagian tengkuk adalah aurat bagi suku Papua. Itu sedikit masalah yang terjadi dalam dunia penyiaran. Belum lagi dengan masalah yang terjadi dalam dunia penyiaran. Belum lagi dengan masalah yang terjadi di provinsi daerah perbatasan. Itulah terbentuknya KPIP (Komisi Penyiaran Indonesia Perbatasan) guna mengatasi permasalahan tersebut.

2.3. Bagan Kerangka Pemikiran



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah wilayah atau daerah perbatasan yang dilaksanakan di Kepulauan Riau. Dimana letak kantor KPID di jalan pramuka sekupang. Adapun periode KPID yang penulis teliti KPID tahun 2011-2014.

3.2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di waktu dan tempat yang sudah ditentukan sebagai tahapan menyelesaikan penelitian ini sampai mendapatkan hasil yang diinginkan. Peneliti melaksanakan penelitian ini di KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) Kepulauan Riau, di Jalan Pramuka no 7b Sei Harapan Sekupang Batam

Waktu penelitian ini dilaksanakan terhitung dari bulan february sampai dengan dengan maret 2014.

3.3. Paradigma Penelitian

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini konstruktivis karena penelitian ini menggunakan beberapa teori sebagai bahan referensi yang akan memperkaya pengetahuan peneliti sebelum turun ke lapangan. Selain itu dengan mengetahui beberapa konsep dan teori terlebih dahulu akan membantu peneliti mendapat gambaran umum diantaranya mengenai Strategi Komunikasi KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) Kepulauan Riau menjalankan peran dan

fungsi kedaulatan Negara Kesatuan Indonesia yang akan membantu dalam merumuskan panduan wawancara.

Teori yang dipakai sebelumnya memiliki kemungkinan untuk diganti dengan teori yang lebih relevan dengan temuan di lapangan. Artinya teori dalam penelitian kualitatif lebih bersifat pasif dan tidak mengintervensi kenyataan alamiah dari fenomena sosial yang hendak diteliti (Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 45).

Menurut Patton, paradigma konstruktivisme tercipta atas dasar relativitas ontologis dimana dipaparkan bahwa terbentuknya realita adalah tergantung dari bagaimana orang memandangnya, dan tidak ada pandangan orang yang diatur oleh data-data empiris (Michael Quinn Patton, *Qualitative Research & Evaluation Methods, 3rd Edition*, (California: Sage, 2001), hal. 92).

Paradigma konstruktivis memiliki beberapa kriteria yang membedakannya dengan paradigma lainnya, yaitu ontologi, epistemologi, dan metodologi. Level ontologi, paradigma konstruktivis melihat kenyataan sebagai hal yang ada tetapi realitas bersifat majemuk, dan maknanya berbeda bagi tiap orang. Dalam epistemologi, peneliti menggunakan pendekatan subjektif karena dengan cara itu bisa menjabarkan pengkonstruksian makna oleh individu. Dalam metodologi, paradigma ini menggunakan berbagai macam jenis pengonstruksian dan menggabungkannya dalam sebuah konsensus. Proses ini melibatkan dua aspek : hermeunetik dan dialetik. Hermeunetik merupakan aktivitas dalam mengkai teks –percakapan, tulisan, atau gambar. Sedangkan dialetik adalah penggunaan dialog sebagai pendekatan agar subjek yang diteliti dapat ditelaah

pemikirannya dan membandingkannya dengan cara berpikir peneliti. Dengan begitu, harmonitas komunikasi dan interaksi dapat dicapai dengan maksimal (William Lawrence Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and quantitative Approaches*, (Pearson Education, 2003). Hlm. 75).

Penulis menggunakan paradigma konstruktivis untuk mengetahui bagaimana tantangan KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) Kepulauan Riau menjalankan peran dan fungsi kedaulatan Negara Kesatuan Indonesia hingga terpenuhinya kebutuhan mereka dari kegiatan tersebut.

3.4. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat fleksibel dan terbuka untuk perubahan dan penyesuaian pada saat penelitian sehingga tidak ada batasan bagi peneliti untuk menemukan hal-hal baru yang terkait dengan topik penelitian (Burhan Bungin, hal. 49).

Pendekatan kualitatif juga menempatkan peneliti sebagai “orang yang belajar dari masyarakat” sehingga penelitian ini cenderung sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.

Melalui pendekatan kualitatif ini, peneliti ingin lebih memahami apa dan bagaimana tantangan KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) Kepulauan Riau menjalankan peran dan fungsi kedaulatan Negara Kesatuan Indonesia, dan kendala apa sajakah yang mereka temui di lapangan.

Pendekatan tersebut akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, pendekatan ini juga diarahkan pada latar belakang dan individu secara holistic (Robert C.

Bogdan dan Sari Knopp Biklen, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*, (Boston: Allyn and Bacon, Inc., 1992), hal. 53).

Ditambahkan pula oleh Jane Richie dalam buku Metodologi Penelitian Kualitatif, bahwa penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial dan perspektifnya di dalam dunia dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti. Jadi pendekatan kualitatif dapat digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan yang lainnya secara holistik dengan cara deskripsi (Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rosda Karya, 2005), hal.69).

Studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenan dengan *how* atau *why*, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata. Dalam penggunaannya, peneliti studi kasus perlu memusatkan perhatian kepada aspek pendesaian dan pengerjaannya agar lebih mampu menghadapi kritik-kritik tradisional tertentu terhadap metode atau tipe pilihannya. (Yin, 1996:1).

Menurut Robert K. Yin, studi kasus adalah suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tidak tampak dengan tegas dan dimana multi sumber bukti dimanfaatkan (Yin,1996:18).

Studi kasus lebih dikehendaki untuk melacak peristiwa-peristiwa kontemporer bila peristiwa-peristiwa yang relevan tak dapat dimanipulasi. Karena itu studi kasus mendasarkan diri pada teknik-teknik yang sama dengan kelaziman yang ada pada strategi historis, tetapi dengan menambahkan dua sumber bukti yang biasanya tidak termasuk dalam pilihan para sejarawan, yaitu observasi dan wawancara sistematis. Kekuatan yang unik dari studi kasus adalah kemampuannya untuk berhubungan sepenuhnya dengan berbagai jenis bukti dokumen, peralatan, wawancara, dan observasi. (Yin, 1996:12).

Studi kasus tidak harus selalu mencakup observasi langsung dan rinci sebagai sumber buktinya. Yang paling penting adalah menjelaskan keterkaitan kausal dalam intervensi kehidupan nyata yang terlalu kompleks bagi strategi survei atau eksperimen. Aplikasi kedua adalah mendeskripsikan konteks kehidupan nyata dimana intervensi telah terjadi. Ketiga, evaluasi bisa memberikan keuntungan dalam bentuk deskriptif. Terakhir, strategi studi kasus bisa digunakan untuk mengeksplorasi situasi-situasi dimana intervensi yang akan dievaluasi tidak memiliki struktur hasil yang tunggal dan jelas. (Yin, 1996:20).

Studi kasus kolektif mempelajari kasus secara bersamaan agar dapat meneliti fenomena, populasi, atau kondisi umum. Dengan begitu, studi kasus kolektif tidak hanya mempelajari satu kasus tertentu saja tetapi beberapa kasus. (Idrus, 2009:58).

Studi kasus dipilih oleh penulis adalah studi kasus kolektif karena peneliti lebih terfokus kepada **fenomena** yang terjadi diberbagai wilayah perbatasan dimana peran KPI, KPID dan KPIDP harus menciptakan iklim penyiaran yang sesuai yang diamanatkan oleh UU penyiaran.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan hasil data yang dikumpulkan bukanlah data yang dapat diuji dengan statistik. (Kountur, 2007:105) Menurut Denzin dan Lincoln, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat interpretif (menggunakan penafsiran) yang melibatkan banyak metode, dalam menelaah masalah penelitiannya. Dalam buku Metodologi Penelitian Kualitatif, Lexy J. Moleong mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik (utuh) dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Moleong, 2004).

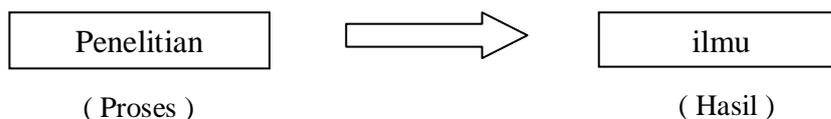
Dalam penelitian kualitatif, peneliti berusaha menggali informasi dari lapangan tanpa berusaha memengaruhi informan. Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang serta perilaku yang dapat diamati. (Bogdan dan Taylor, 1975:5 dalam Moleong, 1989:3) Penelitian kualitatif tidak bertujuan menkonfirmasi realitas tetapi membangun realitas yang sebelumnya tersembunyi.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh terhadap permasalahan. Peneliti menggali informasi dari informan tanpa berusaha mempengaruhi informan. Peneliti mendapatkan hasil berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari informan.

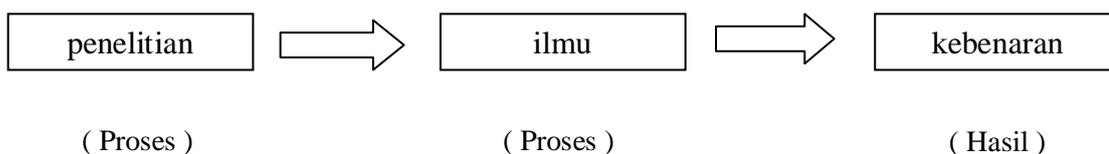
3.5. Key Informan

Menurut **Lexy J, Moleong**, “informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi penelitian (Moleong;2004:90). Dengan demikian *key informan* atau narasumber adalah orang yang dianggap penulis yang mampu dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Orang yang berperan besar dan bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan, Ketua KPID Kepulauan Riau. Dan ini berarti, *key informan* haruslah memiliki kapabilitas dan kemampuan dalam berbagi informasi kepada penulis untuk memberikan informasi yang terkait.

Gambar 3.1



Gambar 3.2



Pada umumnya, suatu kebenaran ilmiah dapat diterima dikarenakan oleh 3 hal (Moleng;2004:15):

- 1 Adanya koheren
- 2 Adanya koresponden
- 3 Pragmatis

Sesuai dengan penelitian ini yang dianggap tepat untuk disebut sebagai *key informan* adalah **H. Jamhur Poti, SE, M. Si** selaku Ketua Komisi Penyiaran

Indonesia Daerah yang bertanggungjawab terhadap Kinerja anggota KPID Kepulauan Riau. **Yendri, MH** selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Perizinan KPID Kepri Dan Informannya adalah **Nasrum MD** selaku Direktur Lembaga Penyiaran Swasta dalam hal ini PT. Radio Azam Mitra Umat yang merasakan sekali dampak yang terjadi di daerah perbatasan, karena program-program yang disiarkan interaktif.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

3.6.1. Data Primer

Data primer adalah data yang hanya dapat kita peroleh dari sumber asli atau pertama. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Esterberg (2002) mendefinisikan interview sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.(Sugiono, 2007:72).

1. Wawancara (Interview)

Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Wawancara dapat dilakukan secara formal pada tempat khusus atau secara spontan di tempat yang tidak membutuhkan pengaturan tertentu (Hammersley, 1996).

Wawancara mendalam dilakukan di setting ilmiah informan sehingga peneliti dapat melihat aktivitas informan sehari-harinya. Wawancara mendalam biasanya menggunakan wawancara tidak berstruktur dan berbekal point-point pertanyaan yang akan dikembangkan sesuai kondisi.

Esterberg (2002) mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semistruktur, dan tidak terstruktur. (Sugiono, 2007:73) Peneliti menggunakan wawancara berstruktur dimana peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif. jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara berstruktur, setiap responden diberikan pertanyaan yang sama. Dalam melakukan wawancara, selain membawa instrumen sebagai pedoman untuk wawancara, peneliti menggunakan alat bantu tape recorder.

2. Observasi

Observasi sebagai tehnik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik biola dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga pada objek-objek alam lain.

Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi participant observation (observasi berperan serta) dan non participant observation, selanjutnya dari segi instrumentasi yang digunakan, maka observasi dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur dan tidak terstruktur.

Namun peneliti menggunakan observasi berperan serta (participant observation) . Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh nara sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.

Dalam suatu perusahaan atau organisasi pemerintah misalnya, peneliti dapat berperan sebagai karyawan, ia dapat mengamati bagaimana perilaku karyawan dalam bekerja, bagaimana semangat kerjanya, bagaimana hubungan satu karyawan dengan karyawan yang lain, hubungan karyawan dengan supervisor dan pimpinan, keluhan dalam melaksanakan pekerjaan dan lain-lain.

3.6.2. Data Sekunder

Data yang didapat dari berbagai pustaka atau pendapat para ahli dapat dijadikan sebagai penunjang data primer. Walaupun dikatakan bahwa sumber diluar kata-kata dan tindakan merupakan sumber kedua, jelas hal itu tak bisa

diabaikan dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi (Deddy Mulyanan;2001:159).

Dalam penelitian ini memperoleh data penelitian melalui pengumpulan data-data tertulis , jurnal, berbagai hasil rapat rakor perbatasan, berbagai judul buku, karya tulis dan bentuk tulisan lainnya yang berguna untuk melengkapi data-data penelitian ini.

3.7. Fokus Penelitian

Konsep penelitian yang dijabarkan adalah langkah-langkah terencana dalam rangka menyampaikan hasil untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, dapat dilihat dari :

- 1 *Planning* : Perencanaan mencakup kegiatan penentuan tujuan (*objectives*) media penyiaran serta mempersiapkan rencana dan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam perencanaan harus diputuskan “apa yang dilakukan, kapan melakukannya, bagaimana melakukannya dan siapa yang melakukannya”.
- 2 *Organizing* : Merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki dan lingkungan yang melingkupinya. Dua aspek utama proses penyusunan struktur organisasi adalah departementalisasi dan pembagian kerja.
- 3 *Actuating* : Memberikan pengaruh (penggerak) mencakup usaha untuk mempengaruhi *influencing* tertuju pada upaya untuk merangsang

antusiasme karyawan untuk melaksanakan tanggung jawab mereka secara efektif. Kegiatan mengarahkan dan mempengaruhi empat kegiatan penting: pemberian motivasi, komunikasi, kepemimpinan dan pelatihan.

- 4 *Controlling* : Suatu proses untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan organisasi atau perusahaan sudah tercapai atau belum, untuk mengetahui bahwa kegiatan berjalan dengan baik dan tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari rancangan semula. Maka diperlukannya koreksi dan evaluasi.
- 5 *Evaluating* : Dalam suatu program acara mengevaluasi setiap program acara yang sudah berlangsung, (Morissan., 2004:132).

3.8. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode *studi kasus*. Studi kasus adalah uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi komunitas, suatu sosial. Penelitian studi berupaya menelaah sebanyak mungkin data mengenai subjek yang diteliti. Studi kasus menggunakan beberapa metode antara lain, wawancara, pengamatan, penelaah dokumen-dokumen, survei dan data apapun untuk menguraikan suatu kasus secara terperinci. (Deddy Mulyana:2001)

Menurut pendapat **Lincoln** dan **Guba** mengemukakan bahwa keistimewaan studi kasus meliputi :

- a) Studi kasus menyajikan uraian menyeluruh yang mirip dengan apa yang dialami pembaca dalam kehidupan sehari-hari.

b) Studi kasus merupakan sarana efektif untuk menunjukkan hubungan antara peneliti dan koresponden.

Keunggulan metode studi kasus adalah bahwa hasilnya dapat mendukung studi-studi yang lebih besar dikemudian hari dan dapat memberikan hipotesis-hipotesis untuk riset lanjutan. (Moh, Nazir, Ph, D. metode Penelitian:2005).

3.9. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk mencapai tujuan penelitian, maka teknik yang digunakan adalah mendeskripsikan dan menganalisa data yang diperoleh secara kualitatif. Analisa deskriptifnya hanya memaparkan situasi atau peristiwa. Penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan dan metode ini artinya melukiskan variable, satu demi satu (Nazir;2005:330). Penulis hanya memaparkan kondisi apa adanya, melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang telah terpilih.

Triangulasi ialah kombinasi beragam sumber data, tenaga peneliti, teori dan teknik metodologi dalam suatu penelitian atas gejala sosial. Triangulasi diperlukan karena setiap teknik memiliki keunggulan dan kelemahan sendirinya. Dengan demikian triangulasi memungkinkan tangkapan realitas secara lebih valid (Denzin;1978:174).

Teknik yang penulis gunakan dalam penelitaan ini adalah **triangulasi sumber**, karena informasi tersebut dapat dicapai dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara (Nazir;2005). Triangulasi Sumber Membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berada dalam penelitian kualitatif (**Patton** 1987 : 331)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum KPI (Komisi Penyiaran Indonesia)

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah sebuah lembaga negara yang bersifat independen di [Indonesia](#) yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Oleh sebab itu sesuai dengan wewenang, tugas dan kewajibannya, KPI mengarahkan sistem penyiaran Indonesia sebagaimana yang diamanatkan oleh UU penyiaran. Khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan tugas, azas, fungsi dan arah penyiaran serta konsiderannya. Komisi ini berdiri sejak tahun [2002](#) berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. KPI terdiri atas Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) dan [Komisi Penyiaran Indonesia Daerah](#) (KPID) yang bekerja di wilayah setingkat [Provinsi](#). Wewenang dan lingkup tugas Komisi Penyiaran meliputi pengaturan penyiaran yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan Lembaga Penyiaran Komunitas. Saat ini Komisi Penyiaran Indonesia diketuai oleh Judhariksawan.

4.1.1.1 Dasar Pembentukan

Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 merupakan dasar utama bagi pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Semangatnya adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan.

Berbeda dengan semangat dalam Undang-undang penyiaran sebelumnya, yaitu Undang-undang No. 24 Tahun 1997 pasal 7 yang berbunyi "Penyiaran dikuasai oleh negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah", menunjukkan bahwa penyiaran pada masa itu merupakan bagian dari instrumen kekuasaan yang digunakan untuk semata-mata bagi kepentingan pemerintah.

Proses demokratisasi di Indonesia menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Karena frekuensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas, maka penggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Sebesar-besarnya bagi kepentingan publik artinya adalah media penyiaran harus menjalankan fungsi pelayanan informasi publik yang sehat. Informasi terdiri dari bermacam-macam bentuk, mulai dari berita, hiburan, ilmu pengetahuan, dll. Dasar dari fungsi pelayanan informasi yang sehat adalah seperti yang tertuang dalam Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yaitu Diversity

of Content (prinsip keberagaman isi) dan Diversity of Ownership (prinsip keberagaman kepemilikan).

Kedua prinsip tersebut menjadi landasan bagi setiap kebijakan yang dirumuskan oleh KPI. Pelayanan informasi yang sehat berdasarkan *Diversity of Content* (prinsip keberagaman isi) adalah tersedianya informasi yang beragam bagi publik baik berdasarkan jenis program maupun isi program. Sedangkan *Diversity of Ownership* (prinsip keberagaman kepemilikan) adalah jaminan bahwa kepemilikan media massa yang ada di Indonesia tidak terpusat dan dimonopoli oleh segelintir orang atau lembaga saja. *Prinsip Diversity of Ownership* juga menjamin iklim persaingan yang sehat antara pengelola media massa dalam dunia penyiaran di Indonesia.

Apabila ditelaah secara mendalam, Undang-undang no. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran lahir dengan dua semangat utama, pertama pengelolaan sistem penyiaran harus bebas dari berbagai kepentingan karena penyiaran merupakan ranah publik dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. Kedua adalah semangat untuk menguatkan entitas lokal dalam semangat otonomi daerah dengan pemberlakuan sistem siaran berjaringan.

Maka sejak disahkannya Undang-undang no. 32 Tahun 2002 terjadi perubahan fundamental dalam pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia. Perubahan paling mendasar dalam semangat UU tersebut adalah adanya *limited transfer of authority* dari pengelolaan penyiaran

yang selama ini merupakan hak eksklusif pemerintah kepada sebuah badan pengatur independen (*Independent regulatory body*) bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Independen dimaksudkan untuk mempertegas bahwa pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan yang bebas dari intervensi modal maupun kepentingan kekuasaan. Belajar dari masa lalu dimana pengelolaan sistem penyiaran masih berada ditangan pemerintah (pada waktu itu rezim orde baru), sistem penyiaran sebagai alat strategis tidak luput dari kooptasi negara yang dominan dan digunakan untuk melanggengkan kepentingan kekuasaan. Sistem penyiaran pada waktu itu tidak hanya digunakan untuk mendukung hegemoni rejim terhadap publik dalam penguasaan wacana strategis, tapi juga digunakan untuk mengambil keuntungan dalam kolaborasi antara segelintir elit penguasa dan pengusaha.

Terjemahan semangat yang kedua dalam pelaksanaan sistem siaran berjaringan adalah, setiap lembaga penyiaran yang ingin menyelenggarakan siarannya di suatu daerah harus memiliki stasiun lokal atau berjaringan dengan lembaga penyiaran lokal yang ada didaerah tersebut. Hal ini untuk menjamin tidak terjadinya sentralisasi dan monopoli informasi seperti yang terjadi sekarang. Selain itu, pemberlakuan sistem siaran berjaringan juga dimaksudkan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi daerah dan menjamin hak sosial-budaya masyarakat lokal. Selama ini sentralisasi lembaga penyiaran berakibat pada diabaikannya hak sosial-budaya masyarakat lokal dan

minoritas. Padahal masyarakat lokal juga berhak untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan kebutuhan politik, sosial dan budayanya. Disamping itu keberadaan lembaga penyiaran sentralistis yang telah mapan dan berskala nasional semakin menghimpit keberadaan lembaga-lembaga penyiaran lokal untuk dapat mengembangkan potensinya secara lebih maksimal. Undang-undang no. 32 Tahun 2002 dalam semangatnya melindungi hak masyarakat secara lebih merata.

4.1.1.2 Visi dan Misi

Visi

Terwujudnya sistem penyiaran nasional yang berkeadilan dan bermartabat untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Misi

1. Mengembangkan kebijakan pengaturan, pengawasan dan pengembangan isi siaran;
2. Melaksanakan kebijakan pengawasan dan pengembangan terhadap Struktur Sistem Siaran dan Profesionalisme Penyiaran;
3. Membangun Kelembagaan KPI dan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran;
4. Meningkatkan kapasitas Sekretariat KPI

4.1.1.3 Profile KPI Pusat

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang lahir atas amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002, terdiri atas KPI Pusat dan KPI Daerah (tingkat provinsi). Anggota KPI Pusat (9 orang) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan KPI Daerah (7 orang) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, anggaran program kerja KPI Pusat dibiayai oleh APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan KPI Daerah dibiayai oleh APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang lahir atas amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002, terdiri atas KPI Pusat dan KPI Daerah (tingkat provinsi). Anggota KPI Pusat (9 orang) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan KPI Daerah (7 orang) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, anggaran program kerja KPI Pusat dibiayai oleh APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan KPI Daerah dibiayai oleh APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).

Dalam pelaksanaan tugasnya, KPI dibantu oleh sekretariat tingkat eselon II yang stafnya terdiri dari staf pegawai negeri sipil serta staf profesional non PNS. KPI merupakan wujud peran serta masyarakat berfungsi mewedahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran harus mengembangkan program-program kerja hingga akhir kerja dengan selalu memperhatikan tujuan yang diamanatkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 Pasal 3: "Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa,

mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia."

Untuk mencapai tujuan tersebut organisasi KPI dibagi menjadi tiga bidang, yaitu bidang kelembagaan, struktur penyiaran dan pengawasan isi siaran. Bidang kelembagaan menangani persoalan hubungan antar kelembagaan KPI, koordinasi KPID serta pengembangan kelembagaan KPI. Bidang struktur penyiaran bertugas menangani perizinan, industri dan bisnis penyiaran. Sedangkan bidang pengawasan isi siaran menangani pemantauan isi siaran, pengaduan masyarakat, advokasi dan literasi media.

Anggota Bidang kelembagaan:

- Bekti Nugroho (Koordinator)
- Fajar Arifianto Isnugroho
- Judhariksawan (Merangkap Ketua KPI Pusat)

Anggota Bidang Struktur Penyiaran:

- Azimah Subagijo (Koordinator)
- Danang Sangga Buana
- Amirudin

Anggota Bidang Pengawasan Isi Siaran:

- Sujarwanto Rahmat (Koordinator)

- Idy Muzayyad (Merangkap Wakil Ketua KPI Pusat)
- Agatha Lily

Mekanisme pembentukan KPI dan rekrutmen anggota yang diatur oleh Undang-undang nomor 32 tahun 2002 akan menjamin bahwa pengaturan sistem penyiaran di Indonesia akan dikelola secara partisipatif, transparan, akuntabel sehingga menjamin independensi KPI.

4.1.1.4 Undang-undang yang terkait Penyiaran

1. [Undang-undang Dasar 1945 \(Amandemen Keempat\)](#)
2. [Undang-undang No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman](#)
3. [Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat](#)
4. [Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen](#)
5. [Undang-undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi](#)
6. [Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia](#)
7. [Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers](#)
8. [Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta](#)
9. [Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak](#)
10. [Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran](#)
11. [Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan](#)

12. [Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah](#)

4.1.2 **Gambaran Umum KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah)**

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID adalah sebuah lembaga negara independen di [Indonesia](#) yang didirikan di setiap provinsi berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di setiap Provinsi di [Indonesia](#). Dasar hukum pembentukannya adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

“Kpi itu komisi penyiaran Indonesia sesuai tentang UU 32 Tahun 2002 tentang penyiaran yang hasil reformasi Tahun 2008 adalah dimana keterwakilan masyarakat di dalam penyiaran karena selama ini pengawasan penyiaran itu berada di tangan pemerintah tapi di dalam negara yang demokrasi itu partisi keterlibatan masyarakat di dalam pengawasan itu sangat dibutuhkan, jadi KPI itu adalah representasi dari masyarakat yang mewakili dari lembaga penyiaran fungsinya, seumpunya ya dia mengawasi sama dengan kalau didalam konsep teori itu adalah bagaimana civil society, civil society itu adalah yang peduli terhadap penyiaran itu, nah.. Indonesia itu civil societynya sama dengan negara Thailand dan Korea, itu bagaimana masyarakatnya peduli sekali terhadap penyiaran di negara mereka, apa yang boleh disiarkan mana yang tidak boleh disiarkan. Kita di Indonesia setelah reformasi Tahun 2008 itu baru ada Komisi Penyiaran Indonesia. Sebenarnya itu adalah orang-orang yang mewakili masyarakat untuk mengawasi media penyiaran, karena apa? Media itu milliknya publik, bagaimana KPI ini tadi seperti sebagai imparisial, dia berada ditengah-tengah antara masyarakat, dia berada tengah-tengah antara negara dengan industri itulah KPI”. (Jamhur Poti, Ketua KPID Kepri)

Eksistensi KPI adalah bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran, baik sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat (UU penyiaran, pasal 8 ayat 1). Legitimasi politik bagi posisi KPI dalam kehidupan kenegaraan berikutnya secara tegas diatur oleh UU

penyiaran sebagai Negara independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran (UU penyiaran pasal 7 ayat 2) secara konseptual posisi ini mendudukan KPI sebagai lembaga kuasi negara atau dalam istilah lain juga dikenal dengan *auxiliary state institution*.

“Di dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran sangat jelas sekali ya, ada KPI pusat dan ada KPI daerah dan hubungan antara KPI pusat dan KPID itu sifatnya koordinatif bukan struktural jadi KPID mengurus yang berhubungan menyangkut penyiaran yang berada di daerah sedangkan KPI pusat kan sifatnya nasional, sifatnya koordinatif saja dengan KPID-KPID yang berada di setiap daerah-daerah. Di Kepulauan Riau, KPID yang terbentuk no 6 di Indonesia tahun 2008 karena pemerintahan Kepulauan Riau pada waktu itu oleh Pak Ismeth Abdullah, beliau sangat konsen sekali terhadap penyiran itu, makanya KEPRI membentuk KPID”. (Jamhur Poti, Ketua KPID Kepri)

Dasar Pembentukan Dasar pembentukan KPI Daerah adalah UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Undang-undang mengamanatkan bahwa KPI harus terbentuk satu tahun setelah berlakunya UU No. 32. Di Pusat, KPI berkedudukan di Jakarta, dan bentuk berdasarkan Keputusan Presiden tertanggal 26 Desember 2003. Pasal 7 Ayat 3, berbunyi: *KPI terdiri atas KPI Pusat dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah dibentuk di tingkat provinsi*. Pasal 9 Ayat 6 berbunyi, *Pendanaan KPI Pusat berasal dari APBN dan pendanaan KPI Daerah berasal dari APBD*. (Rincian selanjutnya, tertera dalam Pasal 7 s/d Pasal 12).

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang sudah berdiri terdapat di 33 provinsi di Indonesia.

Di sini penulis meneliti mengenai Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kepulauan Riau. KPID seluruh Indonesia memiliki hak, tugas,

wewenang dan kewajiban serta peran yang sama. Hanya saja visi dan misi yang berbeda karena permasalahan setiap daerah memiliki keunikan masing-masing, apalagi Kepulauan Riau termasuk salah satu KPID perbatasan.

Kantor KPID Kepulauan Riau bertempat di Jalan Pramuka No 7B Sei Harapan, Sekupang Batam. Memiliki 3 bidang yang sama dengan seluruh KPID maupun KPI, yaitu bidang isi siaran, perizinan dan kelembagaan.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kepulauan Riau pertama kali dibentuk pada bulan Juni 2005 dengan pengangkatan anggotanya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepulauan Riau No. 51/SK/VI/2005 dengan tujuh orang anggota saat itu Hendriyanto, Aulya Indriaty, Lisy Anggraini, Desliana Dwita, Noerwandi, Andrian Indra dan Ardian Yulianto dengan masa jabatan tiga tahun.

Pada September 2008, dilantik anggota KPID Kepri periode kedua berdasarkan SK Gubernur Kepulauan Riau No. 326 Tahun 2008 dengan 7 anggota yaitu Amril, H. Jamhur Poti, Noerwandi, Desliana Dwita, Aulya Indriaty, Tony Kusuma Wijaya dan Parlindungan Sihombing dengan masa jabatan hingga 2011.

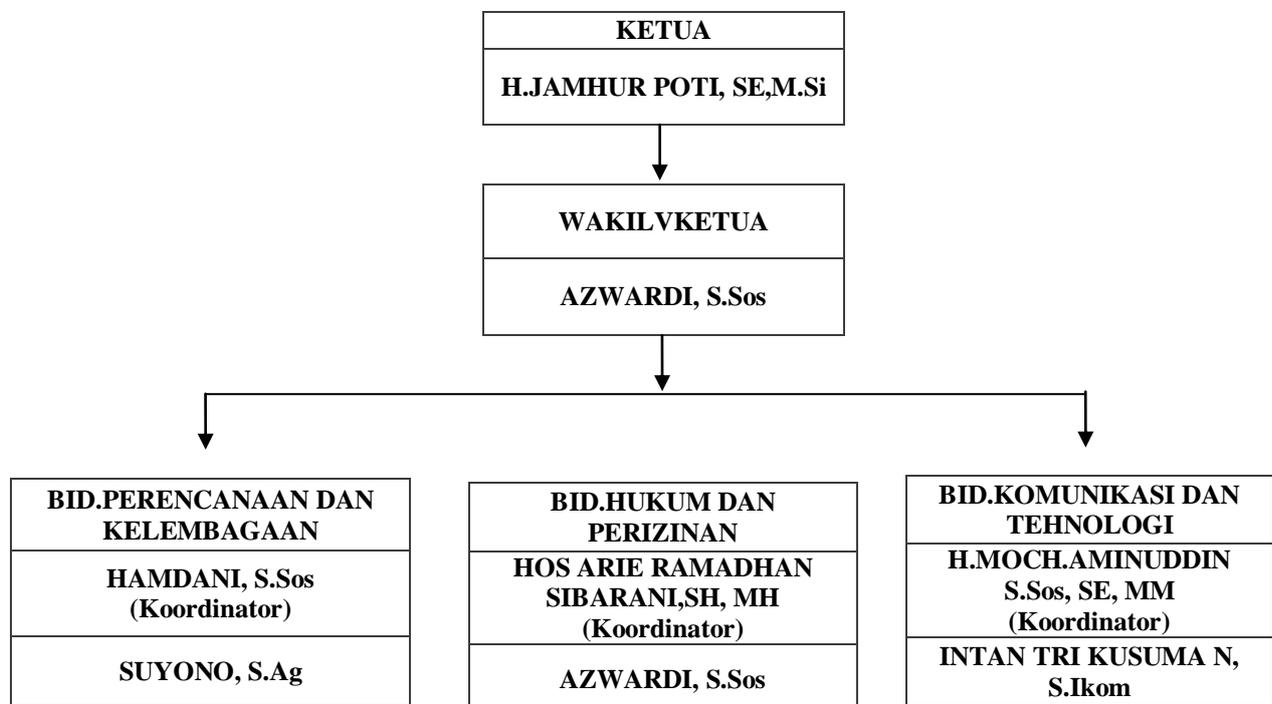
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kepulauan Riau terbentuk berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Pasal 7 ayat 2 yang menyatakan bahwa KPI terdiri atas KPI pusat dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah di tingkat Provinsi. Komisi Penyiaran Indonesia

merupakan lembaga yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran dan merupakan representasi publik di bidang penyiaran.

Keberadaannya dituntut berpihak pada kepentingan publik, sehingga dalam setiap kebijakan selalu didasarkan semangat penguatan demokrasi dan civil society.

Tahun 2011-2014 dilanjutkan oleh komisioner-komisioner baru. Incumben hanya satu yaitu Jamhur Poti selaku Ketua KPID Kepulauan Riau. Adapun struktur organisasinya sebagai berikut:

**4.1 Gambar
Struktur
Organisasi KPID**



4.1.2.1 Visi dan Misi KPID Kepulauan Riau

Visi KPID Kepulauan Riau

Mewujudkan dan mendorong sistem penyiaran di Kepulauan Riau untuk Kesejahteraan dan ke[entingan masyarakat Kepulauan Riau demi terwujudnya sistem penyiaran nasional sesuai amanat Undang-undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Misi KPID Kepulauan Riau

1. Membangun dan memelihara tatanan informasi daerah Kepri yang adil, merata dan arus informasi yang harmonis antara pusat dan daerah Kepri, antar wilayah di Kepri dengan daerah lainnya di Indonesia.
2. Mendorong lembaga penyiaran untuk menjunjung tinggi nilai-nilai agama, khasanah, lokalitas dan kearifan lokal yang telah menjadi budaya komunikasi sosial antara anggota masyarakat Kepulauan Riau.
3. Mendorong lembaga penyiaran di Kepulauan Riau untuk menjadi lembaga yang profesional dengan memiliki kredibilitas serta daya saing melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan teknologi pada lingkup lokal maupun regional mengingat posisi Kepulauan Riau yang berada di pintu terluar Indonesia yang berhadapan langsung dengan negara tetangga, Singapura, Malaysia dan Vietnam.
4. Mendorong lembaga penyiaran di Kepulauan Riau menjadi pilihan masyarakat di Kepulauan Riau dan bisa mengurangi ketergantungan

masyarakat terhadap lembaga penyiaran asing (Singapura, Malaysia dan Vietnam).

5. Mendorong masyarakat untuk menjadi khalayak yang kritis dan rasional dalam menjamin hak masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan bermanfaat.
6. Mendorong lembaga penyiaran menumbuhkan kesadaran pentingnya memahami perbedaan sebagai suatu anugerah keunikan dan menjadi kekuatan masyarakat Kepulauan Riau. Mengingat heterogenitas masyarakat di Kepulauan Riau.
7. Mendorong lembaga penyiaran menjadi sensitif dengan persoalan-persoalan di daerah Kepulauan Riau dan menjalankan upaya sesuai dengan perannya.

“Visi dan misinya sih hampir sama hanya saja kalau di daerah itu kan dia lebih mengutamakan daerahnya, umpanyanya lembaga penyiaran itu bisa berperan aktif, membangun daerahnya, dapat berkontribusi, berkontribusinya itu tidak bersifat finansial tapi membangun, mencerdaskan, memberikan edukasi kepada masyarakat kita tentang pembangunan-pembangunan. Nah, semakin tinggi pengetahuan masyarakat tentang informasi dengan diharapkan juga pengetahuan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau inikan juga semakin besar sehingga tingkat perekonomian masyarakat itu juga semakin baik, itu yang diharapkan sebenarnya dari penyiaran. Jadi penyiaran itu multi efek dia tidak langsung, begitu penyiaran ada, langsung membuat orang sejahtera ya juga tidak, tapi kan masyarakatnya juga harus cerdas dahulu, harus pintar itu nilai-nilai edukasinya sebenarnya”.

(Jamhur Poti, Ketua KPID Kepri)

Visi dan misi KPI dan juga KPID secara keseluruhan sama, hanya saja yang membedakan adalah beberapa factor geografis, letak wilayah yang berbeda serta pendidikan yang berbeda pula, ini dipengaruhi oleh

tingkat pendapatan disetiap wilayah atau provinsi yang berbeda-beda. Itu menjadi indicator terbentuknya visi dan misi.

4.1.3 Gambaran Umum KPIDP (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Perbatasan)

Komisi penyiaran indonesia perbatasan dilaksanakan untuk pertama kalinya di Batam, Kepulauan Riau pada tanggal 28 sampai 30 Juni 2012. KPIDP terdiri dari 12 provinsi perbatasan yaitu, Provinsi Aceh, Sumatra Utara, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat.

KPIDP ini dibentuk bertujuan agar kebutuhan masyarakat akan informasi, pendidikan dan hiburan di wilayah perbatasan dapat terpenuhi secara merata. Tidak hanya itu beberapa masalah-masalah secara kualitatif, karakteristik serta fakta umum mengenai kawasan perbatasan adalah sebagai berikut:

1. Kondisi kawasan perbatasan sebagian besar berupa laut dan pulau-pulau kecil. Akibatnya, pembangunan infrastruktur seringkali mahal dan tidak efisien.
2. Komunitas yang terpencar di berbagai pulau kecil mengakibatkan aktivitas ekonomi terpisah dalam satuan-satuan kecil.
3. Di wilayah perbatasan yang berbasis darat, kondisi infrastruktur sangat tergantung dengan kondisi geografis setempat.

4. Di Kalimantan Barat, sebagian wilayah perbatasan kondisinya tidak berkembang. Hal ini disebabkan adanya interaksi lemah dengan pusat pertumbuhan di wilayah Indonesia.
5. Di perbatasan NTT dan Timor Leste, kondisi geografis amat buruk dan miskinnya sumber daya alam menyulitkan pembangunan wilayah.
6. Perbatasan Papua dan PNG berada dalam kondisi tertinggal, disebabkan topografi berbukit dan bergunung sehingga penyediaan infrastruktur menjadi sulit dan mahal (Agung Mulyana. 2011: 4-10).

Masalah wilayah perbatasan lainnya adalah:

1. Langkanya prasarana dasar yang dibutuhkan untuk mengembangkan kapasitas sumber daya alam seperti jalan, jembatan, dermaga, listrik sekolah, dll.
2. Tidak tersedianya rencana detil dan padu mengenai tata ruang kawasan perbatasan.
3. Pembangunan di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar masih bersifat parsial.
4. Langkanya investasi/penanaman modal yang masuk ke kawasan perbatasan.
5. Langkanya sumber daya manusia terdidik, terlatih.
6. Tingginya angka kemiskinan dan rendahnya indikator pembangunan manusia di kawasan perbatasan (Agung Mulyana. 2011: 6-7).

4.1.4 Kondisi, Dinamika dan Tantangan di Daerah Perbatasan

Kepulauan Riau

Permasalahan pembangunan di kawasan perbatasan sangat erat berkaitan dengan masalah kedaulatan bangsa dan negara, kesejahteraan rakyat, perlindungan kepentingan masyarakat perbatasan yang masih tertinggal dan kurang terurus, serta lingkungan hidup. Berbagai isu tentang batas wilayah negara dan pengelolaan kawasan perbatasan yang selama ini terjadi masih dianggap sebagai masalah *defence-security* dan *law enforcement*, padahal di era damai dewasa ini permasalahan sudah bergeser ke lebih menyangkut masalah prosperiti, *social security* dan kesetaraan terhadap akses perekonomian yang kurang perhatian, sehingga berkembang diskursus baru tentang “*borderless states*” dimana aktor-aktor baru non-negara lebih meningkatkan perannya. Oleh karena itu cara pandang *defence security* dan *law enforcement* saja jelas harus diubah oleh pemerintah Indonesia dengan memperhatikan para aktor non-negara guna menyusun aturan dan acuan yang jelas dalam proses penyelesaian batas negara dan dalam pengelolaan kawasan perbatasan guna terwujudnya perbatasan sebagai beranda depan negara sesuai *outlook* perbatasan yang diharapkan masa depan.

Karakteristik daerah perbatasan yang berada pada Provinsi Kepulauan Riau pada umumnya merupakan kawasan perbatasan perairan dan lautan serta merupakan pulau-pulau kecil. Pintu masuk lintas batas antara Indonesia-Singapura dan Indonesia-Malaysia yang terkonsentrasi pada Pulau Batam dan Karimun (untuk kawasan industri dan maritim) dan Pulau Bintan (untuk

industri pariwisata). Sedangkan pulau-pulau lainnya hanya memiliki patok batas antarnegara yang dijadikan sebagai titik koordinat perbatasan.

4.1.4.1 Kondisi dan Dinamika Daerah Penyiaran



Gambar 4.2

1. Salah satu dari sekian banyak ancaman yang paling mengemuka dari kondisi provinsi Kepulauan Riau yang berada di kawasan perbatasan dan memiliki pulau-pulau terluar saat ini antara lain adalah : Keberadaan pulau-pulau terluar tersebut yang berpotensi hilang karena penambangan pasir yang hampir meneggelamkan pulau tersebut. Selain itu permasalahan di provinsi Kepulauan Riau yang mengemuka saat ini, antara lain terancamnya garis batas dan kaburnya titik koordinat ketiga negara (Indonesia, Singapura, Malaysia).

2. Ketidakjelasan batas negara dan proses penyelesaian perlu diakselerasi dengan penetapan secara *de jure* dan *de facto* sehingga dapat menjadi basis *outlook* perbatasan yang diharapkan masa depan sebagai beranda dengan negara kesatuan Republik Indonesia.
3. Ketegasan garis batas tersebut penting untuk menentukan landasan yuridis pengelolaan suatu wilayah perbatasan terutama bagi wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga sebagaimana halnya Kabupaten Natuna, Kabupaten Anambas dan Karimun serta Kota Batam. Lemahnya hukum dan peraturan perundang-undangan perbatasan.
4. Diperlukan konsolidasi dan koordinasi bersama untuk melakukan akselerasi terhadap status legal formal wilayah perbatasan. Sebagai ilustrasi bahwa saat ini Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) juga melakukan percepatan terhadap upaya penanggulangan berbagai permasalahan perbatasan dengan membentuk Pansus Perbatasan.

4.1.4.2 Tantangan

1. Permasalahan pembangunan di kawasan perbatasan provinsi Kepulauan Riau saat ini bukan saja persoalan *masalah kedaulatan bangsa yang sangat bersinggungan dengan persoalan keamanan (security issue)* yakni ketika penjagaan dan perlindungan terhadap kekayaan dan sumber daya kelautan yang dengan leluasa dicuri oleh kapal-kapal berbendera asing di

perairan Natuna dan Anambas, persoalan *transnational crime* seperti penyelundupan, perdagangan narkoba dan trafficking perdagangan ilegal dan penyelundupan manusia untuk tenaga kerja ilegal di Malaysia dan Singapura merupakan persoalan yang masih mengemuka.

2. Isu *defence-security* dan *law enforcement* terhadap penanganan permasalahan perbatasan saat ini berkaitan erat dengan bagaimana isu-isu terkait prosperiti, *social-security* dan kesetaraan terhadap akses perekonomian. Lokasi penelitian di wilayah Kabupaten Karimun dan Anambas sebagai Kabupaten pemekaran misalnya menunjukkan gambaran terhadap bagaimana ketersediaan sumber daya ekonomi dan sumber daya alam yang luar biasa seperti sektor perikanan dan sektor pertambangan seperti cadangan gas dan minyak bumi di Kabupaten Natuna dan Anambas tidak dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Terbatasnya jumlah aparat serta prasarana dan sarana pendukung operasi lapangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pertahanan keamanan di perbatasan negara masih sangat kurang dan tidak sebanding dengan panjang garis batas.
4. Permasalahan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat, perlindungan kepentingan masyarakat perbatasan yang masih tertinggal dan kurang terurus, akses dan kesetaraan terhadap perekonomian di daerah perbatasan serta persoalan pemanfaatan

dan implikasi pemanfaatan eksplorasi pada sektor lingkungan hidup.

Penjelasan di atas mengenai garis besar beberapa permasalahan yang terjadi di daerah perbatasan. Tiap-tiap daerah perbatasan memiliki permasalahan yang berbeda-beda, terutama mengenai penyiaran.

Kepulauan Riau (Kepri) memiliki lima kabupaten dan dua ibu kota. Yang paling tua, kita mengenal Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Anambas yang paling muda.

4.1.5 Permasalahan Penyiaran di Daerah Perbatasan Wilayah Provinsi Kepulauan Riau



Permasalahan perbatasan yang terjadi di daerah Kepri:

1. Daerah blank spot di Anambas dan Natuna yang tidak tersentuh siaran-siaran lembaga penyiaran dari Indonesia.
2. Sistem Siaran Jaringan (SSJ) yang masih minim siaran lokal.
3. Penjualan perangkat receiver (antena, dekoder, parabola) yang bebas dari luar negeri (Singapura, Malaysia dan China).

4. Dalam dunia penyiaran sendiri pun, banyak permasalahan-permasalahan yang dianggap sederhana tapi dampaknya sangat luarbiasa. Dominasi tayangan-tayangan asing yang masuk ke pulau-pulau terluar, sehingga tak bisa terpantau oleh KPID Kepri. Tayangan-tayangan ini berisi tayangan yang tak lepas dari program dewasa. Namun ini, tidak sepeuhnya kesalahan dari masyarakat yang tidak mau menikmati tayangan dari dalam negeri, karena tayangan nasional tidak mampu menembus ke daerah-daerah terluar. Siaran asing yang bebas masuk (free to air) ke Kepri, Indonesia.
5. Maraknya siaran TV-TV Singapura yang menampilkan adegan sensual (ciuman, gerakan erotis, under wear).
6. Maraknya lokal operator lembaga penyiaran berlangganan yang belum memiliki izin.
7. Lembaga penyiaran yang ingin membangun radio atau televisi harus melalui proses perizinan yang cukup panjang.
8. Daerah yang terdiri dari pulau-pulau terluar dan terpisah jauh bahkan diantaranya desa-desa yang kurang maju sehingga sangat minim bahkan tidak ada orang yang berinvestasi dalam bidang penyiaran.
9. Permasalahan infrastruktur untuk kegiatan penyelenggara penyiaran sangat rumit dan mahal karena dari pulau kepulauan lain

atau kabupaten ke kabupaten lain dipisahkan oleh lautan yang sangat jauh.

4.2 Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dan data di lapangan penulis dapat mengidentifikasi mengenai Strategi Komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dalam Mendorong Penyiaran Perbatasan (Studi Kasus KPID Kepulauan Riau Periode 2011-2014) sebagai berikut:

4.2.1 Identifikasi Permasalahan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dalam Mendorong Penyiaran Perbatasan

Pada Bab ini penulis akan menjelaskan apa yang telah didapat pada saat penelitian. Pada Bab ini penulis juga akan menguraikan hasil penelitian tentang Strategi Komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dalam Mendorong Penyiaran Perbatasan (Studi Kasus Pada KPID Kepulauan Riau Periode 2011-2014). Penulis mendapatkan data-data setelah melakukan wawancara secara mendalam, Indept interview. Narasumber yang penulis wawancarai adalah **H. Jamhur Poti, Se, M.Si** selaku Ketua KPID Kepulauan Riau yang memiliki bertanggung jawab terhadap kinerja dan dalam pengambilan keputusan atau kesepakatan dalam rapat pleno. Dan yang menjadi informannya adalah **Yendri, MH** selaku Kepala Sub Bidang Perizinan, karena penulis menganggap bahwa bidang perizinan juga menjadi masalah yang utama dalam penyiaran di daerah terutama daerah perbatasan dalam hal ini adalah Kepulauan Riau. Dan **Nasrum, MD** selaku Direktur Lembaga

Penyiaran Swasta dalam hal ini PT. Radio Azam Mitra Umat yang merasakan sekali dampak yang terjadi di daerah perbatasan.

“Untuk memaksimalkan fakta yang terjadi di lapangan, bisa dilihat dari data-data perbatasan pada buku perbatasan di wilayah Indonesia. Permasalahan perbatasan bisa dikatakan ‘unik’ karena tayangan dari TV asing dan program radio asing dari Negara tetangga. Dampak dari tayangan dan program dirasakan oleh masyarakat Kepulauan Riau terutama anak-anak. Nah, krisis kebudayaan inilah yang dikhawatirkan akan melupakan budaya Melayu. Seluruh KPIDP dan instansi terkait sudah saling bekerja sama guna menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menjaga dan mendorong penyiaran di daerah perbatasan terutama daerah Kepulauan Riau. (Jamhur Poti, Ketua KPID Kepri, 3 April 2014).”

Televisi dan radio adalah salah satu media yang digunakan oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi, baik hiburan, berita dan pendidikan. Banyak cara yang dilakukan orang untuk mendapatkan informasi tersebut, dimanapun dan kapanpun mereka dapat mengakses secara langsung, melalui media yang terdapat disekitarnya. Misalnya, televisi yang terdapat di mobil, kantor, kamar, rumah sakit ataupun dalam android (*smartphone*).

Bukan hanya dimanapun anda berada anda mendapatkan akses untuk mendapatkan informasi tetapi yang menjadi masalah adalah jika informasi yang didapat melanggar ketentuan UU yang sudah ditetapkan, misalnya persentase secara berlebihan mengenai program asing, program berbaur atau mengarah pada *sexs*, batasan-batasan terhadap berita *criminal*, program pendidikan yang baik, program kebudayaan yang sulit didapatkan. Siapakah yang menyikapi atau yang berwenang dalam penyelenggara penyiaran ini?

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran membentuk sebuah Lembaga Independen Negara untuk mengatur jalannya penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah sebuah lembaga

negara yang memiliki fungsi dan wewenangnya guna mengatur tatanan dalam pelaku penyelenggara penyiaran. Di Indonesia KPI terdapat di setiap provinsi, ada 34 provinsi dan 34 pula KPI di Indonesia. Pusatnya atau yang menjadi induk KPI adalah KPI yang berada di Jakarta, dan KPI tersebut dikatakan sebagai KPI Pusat, sedangkan KPI yang berada di seluruh provinsi adalah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID). Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) adalah sebuah lembaga Negara independen di Indonesia yang didirikan di setiap provinsi berfungsi sebagai regulator penyelenggara penyiaran yang terdapat di Indonesia.

Dalam rangka menjalankan fungsinya KPI memiliki kewenangan (otoritas) menyusun dan mengawasi berbagai pengaturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Pengaturan ini mencakup semua daur proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, operasionalisasi, pertanggungjawaban dan evaluasi. Dalam melakukan kesemua ini, KPI berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga lainnya, karena spectrum pengaturannya saling berkaitan. Ini misalnya terkait kewenangan yudisial dan yustisial karena terjadi pelanggaran yang oleh UU penyiaran dikategorikan sebagai tindak pidana. Selain itu, KPI juga berhubungan dengan masyarakat dalam menampung dan menindaklanjuti segenap bentuk apresiasi masyarakat terhadap lembaga penyiaran maupun terhadap dunia penyiaran pada umumnya.

Salah satu visi dan misi KPI Pusat adalah mewujudkan system penyiaran nasional yang berkeadilan dan bermartabat untuk memanfaatkan

sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Serta mengembangkan kebijakan pengaturan, pengawasan dan pengembangan isi siaran, pengembangan terhadap struktur system siaran, melaksanakan kebijakan pengawasan, berpartisipasi dengan masyarakat serta meningkatkan kapasitas sekretariat KPI. Dan masing-masing KPID memiliki visi dan misi yang berbeda pula sesuai dengan batas wilayah, geografis serta kependudukan.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) adalah lembaga independent Negara di Indonesia yang didirikan di setiap provinsi berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di setiap provinsi di Indonesia. Intinya segala sesuatu yang berhubungan dengan frekuensi, mulai dari televise, radio dan tv kabel adalah ranah dari KPI dan KPID.

Dengan demikian pengertian Strategi Komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dalam Mendorong Penyiaran Perbatasan (Studi Kasus Pada KPID Kepulauan Riau Periode 2011-2014) adalah suatu lembaga yang menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan perundang-undangan dalam mengatur penyelenggara kegiatan yang berkaitan dengan frekuensi. Serta tak lepas dari peran bidang yang terdapat dalam susunan struktur organisasi KPID (bidang perizinan, bidang konten isi siaran dan bidang kelembagaan) yang harus bekerja sama dengan baik agar dalam proses perizinan dan juga pelanggaran yang sering terjadi dapat secepat mungkin ditindak sesuai UU dan P3SPS (pedoman perilaku penyiaran dan standart program siaran). Dalam memenuhi kebutuhan informasi tak lepas pula dari kegiatan-kegiatan televisi maupun radio. Jika dalam setiap proses penyelenggara kegiatan media mampu bertindak dan bekerja sama dengan

KPID maka proses dan segala aktivitas penyiaran akan berjalan dan mampu memberikan informasi sesuai yang diharapkan bersama. Teori tersebutlah yang dipakai oleh penulis sebagai dasar untuk melakukan analisa data hasil penelitian mengenai Strategi Komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dalam Mendorong Penyiaran Perbatasan (Studi Kasus Pada KPID Kepulauan Riau Periode 2011-2014).

Permasalahan tersebut penulis deskripsikan dengan menguraikan sistematika dalam bentuk teknis yang disusun oleh penulis dalam **Strategi Komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dalam Mendorong Penyiaran Perbatasan (Studi Kasus Pada KPID Kepulauan Riau Periode 2011-2014)** sebagai berikut:

4.2.1 Perencanaan atau *Planning*

Perencanaan mencakup kegiatan penentuan tujuan (*objectives*) media penyiaran serta mempersiapkan rencana dan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam perencanaan harus diputuskan “apa yang dilakukan, kapan melakukannya, bagaimana melakukannya dan siapa yang melakukannya”.

Dalam proses ini KPID membuat rumusan masalah, rumusan masalah ini terdiri permasalahan-permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan, khususnya KPID Kepri.

A. Menyusun Draft Pemasalahan

“Didalam perencanaan, kami di KPID Kepri ini menulis permasalahan-permasalahan dari masing-masing bidang. Bagian infrastruktur (konten siaran) menulis permasalahan yang terjadi akibat tayangan asing yang masuk ke wilayah Kepri, kemudian bagian perizinan menulis apa saja yang menjadi kendala bagi calon

pelaku penyiaran dan yang terakhir adalah bagian kelembagaan, juga seperti itu. (Jamhur Poti, Ketua KPID Kepri, 3 April 2014).”

Pada bagian perencanaan ini seluruh KPID menyusun berbagai permasalahan yang terjadi pada wilayahnya masing-masing. KPID menyusun tiga permasalahan di tiap-tiap bidang. Pertama, bidang infrastruktur atau isi siaran. Kedua, bidang perizinan dan ketiga yaitu bidang kelembagaan.

Dalam pengolahan penyampaian pesan, dilakukan beberapa cara pengambilan keputusan. Seperti Rapat Pleno, Rakernis, Rakornis, Rakernas, Rakornas dan juga FGD (*Forum Group Discussion*).

“Kalau KPID Kepri kami rutin melakukan rapat pleno. Pleno ini kami lakukan seminggu 2 kali dan itu wajib diikuti oleh seluruh komisioner. Pleno jatuh pada hari senin dan selasa, kami membahas banyak hal dalam pleno, masing-masing bidang menyampaikan apa yang terjadi, apakah ada kendala, permasalahan, ataupun *planning* yang akan datang. Selain itu jika misalnya terjadi kesalahan pemahaman antara pelaku penyiaran kami sering melakukan pembahasan di FGD. Adapula Rakornas yaitu Rapat Koordinasi Nasional ini dilakukan oleh seluruh KPI yang ada di Provinsi Indonesia. Tapi sebelum Rakornas dilakukan terlebih dahulu Rakernis, Raker, Rakornis dan Rakernas (Jamhur Poti, Ketua KPID Kepri, 3 April 2014).”

Rapat-rapat yang dilakukan oleh KPI maupun KPID guna untuk merumuskan suatu masalah yang dianggap sulit untuk diselesaikan. Masing-masing rapat itupun memiliki fungsi yang berbeda-beda. Misalnya Rapat Pleno, Pleno adalah pertemuan wajib bagi KPID Kepri. Yang dilakukan setiap hari senin dan selasa. Rapat ini dilakukan untuk merumuskan suatu masalah baik internal maupun eksternal yang terjadi di dalam KPID Kepri. Perumusan masalah ini juga terkadang diikuti oleh staff ahli ataupun bagian dari sekretariat. Pembahasan yang dibahas

misalnya mengenai, bidang konten isi siaran, apakah terjadi pelanggaran dalam seminggu terakhir, kemudian jika ada Koordinator bidang isi siaran meminta saran atau kesepakatan oleh Ketua. Lalu misalnya untuk bidang perizinan, apakah ditemukan frekuensi-frekuensi “liar” yang masuk dalam wilayah Kepri. Kemudian dicari langkah-langkah guna menemukan dan mendorong lembaga tersebut untuk membuat IPP.

B. Merumuskan dan Fokus Permasalahan Perbidang

Draft permasalahan setelah dibuat kemudian diperkecil ruang lingkup permasalahan sehingga tidak meluas dan bisa lebih spesifik. Merumusan ini melalui beberapa proses diskusi.

”Setelah melakukan rapat pleno dan draft permasalahan, dikerucutkan permasalahannya. Artinya, fokus permasalahan perbidang didiskusikan. Setelah melalui beberapa proses rapat, kemudian akan dilanjutkan di Rakornas. Untuk KPIDP diberi waktu khusus untuk pembahasan, diluar dari rapat perbidang. (Jamhur Poti, Ketua KPID Kepri)”

Rapat selanjutnya yang rutin dilakukan adalah Rakornas yaitu Rapat Koordinator Nasional, Rakornas dihadiri oleh seluruh KPI yang berada di Indonesia. Sebelum Rakornas dimulai terlebih dahulu Rakernis, Raker, Rakornis. Di Rapat tersebut membahas masalah yang terjadi masing-masing provinsinya. Setiap KPID mempersentasikan dan membuat pola permasalahan, kemudian dirumuskan maka timbullah sebuah kesepakatan. Keputusan dan kesepakatan tersebut di laksanakan di Rakornas. Selain itu Rakornas juga membuat sebuah kebijakan atau peraturan dalam perumusan masalah-masalah yang terjadi.

Dalam penyiaran, baik radio maupun televisi dan media lainnya tidaklah selalu berjalan baik. Misalnya saja yang terjadi kepulauan riau (daerah perbatasan), banyak tayangan asing yang masuk begitu saja, tidak memerlukan suatu alat khusus untuk mendapatkannya. Tayangan yang masuk pun tidak hanya satu Negara saja. Ini yang berdampak menipisnya rasa nasionalis masyarakat kepulauan riau.

“Yang paling utama yang dihadapi adalah masalah perizinan dan infrastruktur, ini lembaga penyiaran itu terlebih dahulu beroperasi dari pada lahirnya KPID itu sendiri, mereka lebih dahulu lahir dan bersiaran. Nah.. agak sulit, kita kan tidak boleh langsung menutup tapi mengajak mereka bagaimana harus mengurus perizinannya. Tantangan terberatnya adalah ini, bagaimana orang mau mengurus izin”.

“Yang kedua tentang letak geografis kepulauan riau karena jarak satu kota atau kabupaten ke kabupaten lainnya dipisahkan oleh laut dan akses transportasi memang sangat sulit, ini juga merupakan tantangan KPID dalam rangka mensosialisasikan, mendorong lembaga penyiaran-penyiaran di daerah ini untuk berizin karena keterbatasan sumber daya manusia kita. Keterbatasan akses transportasi kita juga memperlambat perkembangan penyiaran yang ada di kepulauan riau khususnya di perbatasan kalao di kota-kotanya sih, seperti Batam, Tanjung Pinang mudah dijangkau, kalau itu kita mudah tapi kalau sudah diperbatasan seperti Lingga, Natuna dan Anambas ini kan susah ya, karena belum tentu dalam seminggu ada pesawat yang dipakai untuk berkunjung kesana”.

“Nah, ini ada dua yang menjadi tantangan bagi KPID Kepri. Yang pertama itu tadi lembaga penyiaran lahir terlebih dahulu daripada KPID dan yang kedua adalah akses transportasi antara pulau dengan pulau, antara kabupaten ke kabupaten itu jaraknya jauh sekali dan makan waktu yang lama”. (Jamhur Poti, Ketua KPID Kepri, 3 April 2014).”

4.2.3. Pelaksanaan

Suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Dalam pelaksanaannya, KPID

melakukan proses *organizing* (pengorganisasian) dan *actuating* (pengaruh).

- A. ***Organizing*** : Merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki dan lingkungan yang melingkupinya.

“Proses pengambilan keputusan tidaklah mudah, masing-masing KPID pasti memiliki kendala yang dihadapinya, baik itu eksternal maupun internal, namun, siap tidak siap rapat Rakornas tetap berjalan” (Jamhur Poti, Ketua KPID Kepri, 3 April 2014).”

Sebelum memulai Rakornas, setiap KPID mempersiapkan keperluan untuk menghadiri rapat, ini berkaitan dengan semua data-data lengkap terkait surat perintah jalan, dalam hal ini dibantu oleh sekretariat KPID serta memberi tahu pihak penyelenggara bahwa saya sudah hadir dalam acara tersebut. Ada daftar atau list nama seluruh KPID seindonesia, lalu tanda tangan sebagai bukti kehadiran. Tak jarang dari KPID yang telat sehari atau dua hari akibat kendala eksternal ataupun internal.

“Biasanya sebelum rapat dimulai, pada malam hari ada acara pembuka dan akan diakhir acara terdapat acara penutupan. (Jamhur Poti, Ketua KPID Kepri, 3 April 2014).”

Rapat koordinasi nasional diawali oleh pembukaan kemudian diakhiri dengan penutupan. Ini dilakukan selain menjaga silaturahmi juga masing-masing KPID dapat mengenal KPID lainnya. Karena terbatasnya masa jabatannya sehingga tak jarang dari KPID merasa asing atau bahkan tidak mengetahui sama sekali mengenai tata tertib pelaksanaan Rakornas.

“Nah, setelah rapat dimulai pada pukul 9 pagi, seluruh KPID berkumpul kurang lebih hanya sejam saja, kemudian pembahasan dilakukan diruangan yang sudah tersedia sesuai bidang masing-

masing. Pembahasan permasalahan ini berjalan cukup alot, terkadang banyak diantara KPID kurang merasa setuju, ya namanya menyatukan pemikiran kan terkadang sulit dan juga dikarenakan permasalahan perbatasan yang terjadi berbeda. Ada beberapa pendapat atau masukan yang dianggap tidak menjadi prioritas dan itu tidak masuk dalam catatan KPIP”

“Proses kesepakatan dan keputusan yang sudah disetujui oleh seluruh KPID, kemudian menjadi catatan bagi KPIP untuk dilanjutkan pada instansi terkait di pusat.” (Jamhur Poti, Ketua KPID Kepri, 3 April 2014).”

Rakornas dimulai pada pukul 9 pagi. Seluruh KPIP dan KPID sudah berkumpul di aula yang sudah disediakan. Kurang lebih 1 jam, masing-masing KPID dibagi-bagi sesuai bidang. KPIP menyediakan 4 ruangan yang akan digunakan untuk rapat. Ruang pertama digunakan untuk bidang kelembagaan, kedua, bidang instrastruktur (isi siaran), ketiga, bidang kelembagaan dan yang keempat adalah aula digunakan untuk acara pembukaan, penutupan sekaligus menjadi ruangan pembahasan perbatasan (KPIDP) serta akan dihadiri oleh instansi-instansi terkait.

“Dihari berikutnya, KPID yang termasuk KPIDP dikumpulkan di tempat yang sudah disediakan. Dan bukan hanya KPIDP saja tapi di pimpin oleh KPI Pusat dan juga dihadiri oleh Balmon Pusat, BNPP, Kominfo Pusat, TNI, dan Instansi terkait lainnya. Melihat kehadiran dari pada undangan, kami KPIDP merasa sangat dihargai, karena apa? Karena permasalahan kami akan dibahas disini dan berharap ada keputusan. Respon dari para undangan tersebut cukup kaget mendengar permasalahan masing-masing dari KPIDP, bahkan dari pihak instansi dan KPI pusat pun tidak percaya dengan apa yang kita ceritakan. Inilah pembahasan yang akan dibahas dan tentunya harapan kami akan membuahkan hasil kesepakatan. (Jamhur Poti, Ketua KPID Kepri, 3 April 2014).”

Pada hari selanjutnya, KPID yang termasuk dalam 12 wilayah perbatasan, dikumpulkan dalam 1 ruangan yang sudah disediakan. Rapat

perbatasan ini diambil dari masing-masing bidang yang dianggap sebagai perwakilan. Perwakilan tersebut sudah membawa data yang sudah disepakati di Pleno. Kemudian dibahas mengenai permasalahan yang terjadi bersama Balai Monitoring, Kominfo, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, TNI dan juga KPI Pusat. Setelah rapat berjalan dengan memakan waktu yang lama akhirnya ditemukan kesepakatan-kesepakatan yang sudah disepakati oleh KPID perbatasan dan KPI Pusat yang menyetujui apa saja yang menjadi prioritas utama.

- B. **Actuating** : Memberikan pengaruh (penggerak) mencakup usaha untuk mempengaruhi *influencing* tertuju pada upaya untuk merangsang antusiasme karyawan untuk melaksanakan tanggung jawab mereka secara efektif

Daerah perbatasan memangnya memiliki masalah yang sangat kompleks. Tidak hanya pelaku penyiaran yang sudah bersiar namun tidak memiliki izin. Dan akibat dari tidak memiliki alat-alat yang standart penyiaran akhirnya mengalami kebocoran. Lalu KPID Kepri memiliki inisiatif untuk membentuk KPIDP pada saat itu yang terdiri dari 12 daerah perbatasan. Masing-masing memiliki masalah berbeda-beda. Kesepakatan dan juga MOU oleh beberapa instansi atau lembaga perbatasan yang sudah dimediasi oleh KPI Pusat pun mempermudah langkah KPID Kepri dalam menindak lanjutin masalah-masalah yang dihadapi. KPID Kepri mengajak seluruh lembaga yang tidak memiliki izin untuk dibantu dalam perizinannya. Dan yang sudah memiliki izin namun peralatan maupun program harus mengikuti standart penyiaran yang sudah ditentukan.

“Kita juga sudah berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait. Yang pertama dengan pihak Balmon (Balai Monitoring) frekuensi. Yang kita lakukan adalah meminta Balmon memberikan kebijakan-kebijakan kepada lembaga-lembaga penyiaran yang ada di perbatasan itu untuk membuat izin sambil bersiaran, padahal sudah jelas di UU sebelum mendapatkan IPP (Izin Penyelenggara Penyiaran) tetap tidak boleh bersiaran, tapi kita minta dispensasi itu dengan catatan selagi tidak mengganggu frekuensi-frekuensi radio lain dan frekuensi penerbangan-penerbangan Internasional”.

“Lalu kita berkoordinasi dengan Badan Perbatasan, apa yang bias kita kerjasamakan terhadap penyiaran-penyiaran yang ada di perbatasan. Dan ketiga kita bekerja sama dengan dinas yang juga terkait dengan masalah penyiaran. Misalnya dengan Dinas Pendidikan dalam rangka memberikan edukasi terhadap masyarakat-masyarakat kita yang tidak terjangkau oleh pendidikan itu, nah.. kita minta Dinas Pendidikan itu bekerja sama dengan lembaga-lembaga penyiaran dalam rangka memberika program-program pendidikan seperti cerdas cermat, siara berbahasa Inggris di radio tersebut, ya begitulah yang kami harapkan dinas-dinas terkait dapat bekerja sama dengan lembaga penyiaran”. Lalu yang terakhir dengan Kominfo Pusat, kita membatu bagaimana lembaga penyiaran yang ada di perbatasan tadi untuk cepat segera diproses perizinan ditingkat pusat”. (Jamhur Poti, Ketua KPID Kepri, 3 April 2014).”

Realitas daerah perbatasan yang begitu luas dengan infrastruktur yang kurang memadai serta jarak yang jauh antar pos-pos penjaga perbatasan, menyebabkan pemerintah sulit melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan.

Upaya yang dilakukan KPID Kepri yaitu melakukan kerja sama dengan pihak balai monitoring, badan perbatasan, dinas-dinas yang berhubungan dengan penyiaran, kominfo pusat. Kerjasama ini menjadi bagian dari tanggungjawab bersama (KPI, KPID, KPIDP, Pemerintah) dengan amanah UU penyiaran. Ini merupakan tugas dan kewajiban bagi KPI dan KPIDP dalam konteks menjaga keutuhan NKRI.

Kebijakan nasional dari KPI adalah:

1. Mengintensifkan koordinasi pemberian program bantuan bagi kawasan perbatasan antar Negara yang terkait dengan infrastruktur dan penggunaan frekuensi/kanal
2. Mengembangkan pemberian kemudahan dalam proses perizinan penyelenggaraan penyiaran di kawasan perbatasan antar Negara yang sesuai dengan kondisi riil pada masing-masing kawasan perbatasan, baik berkenaan dengan syarat dan prosedur pendirian, waktu, biaya, perluasan/penambahan wilayah layanan serta peningkatan kelas pemancar lembaga penyiaran
3. Mengintensifkan pelibatan peran KPI dalam pengukuran penggunaan frekuensi di kawasan perbatasan antar Negara.
4. Meningkatkan pemanfaatan program tanggung jawab social perusahaan untuk membantu penguatan penyelenggara penyiaran dikawasan perbatasan antar Negara.
5. Memantau lubeiran siaran asing di kawasan perbatasan antar Negara.
6. Melakukan pengawasan khusus kelembagaan lembaga penyiaran di kawasan perbatasan antar Negara.
7. Mengembangkan *pilot project* model lembaga penyiaran di kawasan perbatasan antar Negara.
8. Mengembangkan program gerakan cinta program siaran Indonesia dalam rangka meningkatkan nasionalisme di kawasan perbatasan antar Negara.

9. Melaksanakan bimbingan teknis pengembangan sumber daya manusia penyiaran di kawasan perbatasan antar Negara.
10. Membentuk gugusan tugas pengembangan penyiaran perbatasan antar Negara.

Kemudian terdapat kebijakan-kebijakan khusus misalnya mempercepat proses perizinan, memproses perizinan analog, memperluas/menambah wilayah layanan dan peningkatan kelas pemancar LPK, mempermudah prosedur pendirian LPK, pengukuran bersama penggunaan frekuensi perbatasan dengan melibatkab KPI, pelibatan LPS melalui program CSR untuk membantu pengembangan penyiaran di perbatasan. Membuat program-program yang meningkatkan rasa nasionalisme.

Lalu kerja sama dengan BNPP (Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan), kesepakatan dalam MOU dengan pengarusutamaan penyiaran dalam pengelolaan perbatasan antar Negara, pemberian kemudahan (kebijakan khusus) dalam penyelenggara penyiaran, pengembangan infrastruktur, SDM dan program siaran dan pemantauan dan evaluasi luberan siaran asing.

Ketentuan-ketentuan tersebut berlaku untuk media penyiaran, baik televisi maupun radio (swasta atau komunitas).

“Ini beda ya, sebenarnya kalau kita berbicara tentang teori efektifitas media penyiaran itu TV tapi teori itu juga tidak berlaku ketika di daerah perbatasan di daerah yang banyak pulau-pulau seperti kita. Kalau di daerah kepulauan seperti ini yang efektif adalah radio ketika dibandingkan dengan TV. Karena TV ini kalau di pulau seperti ini banyak *blank spot* areanya. Banyak daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh media penyiaran khususnya televisi, mungkin berhubung dengan kontruksi tanahnya dan

jauhnya jangkauan itu sehingga masyarakat kita di kepulauan riau mereka lebih suka mendengarkan radio dari pada menonton TV itu karena banyak sekali daerah-daerah di Kepri yang tidak terjangkau oleh siaran TV tapi kalau radio sampai ke desa-desa perbatasan itu mudah dijangkau. Dalam rangka itu juga sebenarnya juga daerah-daerah *blank spot* itu kita mendorong bagaimana daerah-daerah itu membuat radio LPP (Lembaga Penyiaran Publik) pemerintahnya dan juga mendirikan radio-radio komunitas, dimana biaya lebih murah daripada mendirikan stasiun televisi. Stasiun televisi ini kita dorong dengan mendirikan TV kabel ya siaran TV kabel tetapi kan terjadi kendala begini, karena wilayahnya ini tadi yang dibatasi lautan, tentu susah menarik kabel melalui laut itu butuh biaya yang besar. Yang kedua TV analog tadi atau TV digital sebenarnya kurang menarik di Kepri ini karena nilai komersialnya sangat rendah sekali sehingga tv-tv nasional itu berminat berinvestasi di Batam kalau dilihat dari segi bisnisnya”. (Jamhur Poti, Ketua KPID Kepri, 3 April 2014).”

Kondisi wilayah Kepri ini menjadi factor utama mengapa radio lebih efektif dibandingkan TV, kondisi ini juga didukung oleh kurangnya investor untuk membangun stasiun TV di daerah perbatasan, karena menganggap tidak menguntungkan bagi mereka.

Minimnya siaran di wilayah perbatasan atau tertinggal dilansir karena tidak berkembangnya media penyiaran di wilayah tersebut. Penyebabnya adalah kurang tertariknya investor menanamkan modal di daerah perbatasan. Hal ini makin dilematis karena kualitas siaran asing (konten dan perangkat) yang masuk ke wilayah-wilayah terbelakang.

Radio menjadi salah satu alternative pencarian informasi jika berada di wilayah kawasan perbatasan. Namun sama halnya dengan TV, kurang banyaknya investor yang mau mencari keuntungan di daerah perbatasan. Kemudian KPID Kepri tidak letih dan kehilangan akal agar penyampaian informasi tetap dapat diusahakan di daerah perbatasan. Pemerintah, sekolah atau organisasi bahkan komunitas tertentu menjadi

bagian terpenting dalam wadah penyampaian informasi. Jalan ini ditempuh karena tidak mengeluarkan banyak biaya yang berlebihan dan menjadi prioritas dalam proses pembuatan IPP.

“Koordinasi dengan RRI (Radio Republik Indonesia) kita hanya melanjutkan saja karena kan sudah ada MOU antar KPI pusat dan RRI. RRI itu kan bentuknya structural sehingga tidak bias bekerjasama dengan KPID karena apa? Keputusan RRI itu berada di pusat. Karena ada MOU itu kami mendorong agar RRI dan TVRI memperluas jangkauannya hingga daerah-daerah pelosok. Dan yang kedua meminta kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah agar memberikan supporting terhadap operasional RRI dan TVRI. Inilah yang diharapkan menjadi salah satu lembaga penyiaran yang dapat memberikan akses aspirasi dan informasi. Karena kalau sudah lembaga penyiaran berorientasi kepada bisnis mereka lebih nilai komersial dari pada pendidikan”. (Jamhur Poti, Ketua KPID Kepri, 3 April 2014).”

Sejumlah upaya telah dilakukan pemerintah untuk meminimalisir kesenjangan informasi tersebut dengan berbagai program dan bantuan. Sayangnya upaya tersebut belum begitu optimal disebabkan beberapa hambatan teknis dan prosedur. Bahkan, sinergitas antara KPI, RRI, TVRI, Kominfo, Balmon, SDPPI dan stakeholders penyiaran lainnya yang belum dibangun banyak terwujud.

”Kita juga sudah bertemu dengan direktur RRI bagaimana untuk mengaktifkan kembali RRI di Natuna karena selama ini sebentar siaran sebentar tidak, maka kami minta RRI di Natuna itu kembali bersiaran, kembali beroperasi yang kami harapkan siaran tidak mati hidup saja tapi dapat bersiaran *continue* memberikan informasi terutama itu di daerah perbatasan. Karena di Natuna dan Anambas itu siaran-siaran nasional itu sangat sudah sekali. Yang mereka terima dan tonton adalah lembaga penyiaran asing yang mereka dapat melalui satelit asing. Nah.. itu rata-rata di Natuna, Anambas dan juga beberapa daerah di Tanjung Balai Karimun, mereka juga menikmati siaran Asing”. (Jamhur Poti, Ketua KPID Kepri, 3 April 2014).”

Hasil inventaris masalah perbatasan KPI, sampai dengan tahun 2012, jangkauan siaran TVRI masih 75% sedangkan RRI 85%. Hingga tahun yang sama itu sekitar 45 kabupaten dan kota belum terjangkau siaran TVRI dan RRI. Di Kepri, ada 9 stasiun radio public termasuk dengan radio pemerintah. Bahkan RRI di kabupaten Natuna tidak beroperasi lagi.

MOU ini dilakukan guna menemukan sebuah kesepakatan strategis. Pasalnya, masyarakat di wilayah perbatasan dan tertinggal sangat membutuhkan siaran nasional. Fakta yang terjadi dilapangan menyatakan jika masyarakat di perbatasan lebih terbiasa mendengar siaran radio Negara tetangga.

“Siaran yang kami dapat tidak hanya dari local saja tetapi juga tayangan dari Singapura dan Malaysia. Hanya saja yang lebih dominan dari pulau Karimun ini sangat dekat dengan Negara Malaysia. Beda halnya jika berada di Batam, kalau Batam kan berdekatan dengan Singapura. Tayangan dan program yang masuk lekat sekali dengan hari-hari besar di Malaysia. Pada bulan Mei kemarin saja, banyak masyarakat yang saling bertukar ucapan selamat hari guru. Sedangkan yang kita ketahui bersama, hari guru atau PGRI jatuh pada tanggal 25 November. Sedangkan hari guru di Malaysia jatuh pada 16 Mei”. (Nasrum MD selaku Direktur Lembaga Penyiaran Swasta, 16 April 2014)

“KPID Kepri sudah melakukan, yang pertama itu adalah di Tanjung Balai Karimun, Lembaga Penyiaran Publik di bawah pemerintahan kabupaten Karimun, itu Alhamdulillah izinnnya sudah kelar. Yang kedua di kabupaten Lingga, itu ada dua. Satu, LPP (Lembaga Penyiaran Publik) local yang dikelolah oleh pemeritah kabupaten dan Alhamdulillah juga izin sudah selesai dan sudah bersiaran. Kedua kita juga mendorong adanya LPK (Lembaga Penyiaran Komunitas) yang dikelolah oleh yayasan pendidikan di Bintan, satu oleh pendidikan, ada pendidikan umum dan yang kedua adalah SMK perkapalan, ini juga sudah berjalan. Di Batam juga ada beberapa radio komunitas juga sekitar dua hal yang sudah berdiri itu dalam rangka mendorong penyiaran di daerah perbatasan yang dikelolah oleh KPID Kepri”. (Jamhur Poti, Ketua KPID Kepri, 3 April 2014).”

Masalah penyiaran yang terjadi di Kepri sangatlah kompleks, mulai dari daerah yang terdapat *blank spot* artinya tidak sama sekali tidak tersentuh siaran-siaran lembaga penyiaran dari Indonesia. System siaran jaringan yang sangat minim dengan siaran-siaran local, sementara siaran asing yang bebas masuk (*free to air*) ke Kepri, Indonesia. Siaran-siaran Singapura yang menampilkan adegan-adegan sensual (ciuman, gerakan erotis dan pakaian yang terbuka). Dan juga maraknya local operator lembaga penyiaran berlangganan yang belum berizin serta yang terakhir adalah minimnya investasi pengusaha local di bidang penyiaran.

Keputusan atau kesepakatan dan kerjasama dengan instansi terkait dengan memberikan kemudahan dalam bidang perizinan, terutama lembaga penyiaran komunitas, mengalokasikan tambahan frekuensi untuk kota Batam, memperbanyak program desa informasi di Kepri guna mengurangi daerah *blank spot* di Kepri, dispensasi bersiaran (radio dan lembaga penyiaran berlangganan) paska mendapatkan rekomendasi kelayakan (RK). Kemudian adanya bantuan/insentif dari APBN untuk anggaran KPID Kepri melalui anggaran KPI pusat, mempertegas penegakan P3SPS (pedoman perilaku penyiaran dan standart program siaran) terkait konten local kepada LP-LP SSJ melalui KPI, memperbanyak rapat koordinasi antar secretariat oleh KPI tentang pentingnya mendukung kinerja komisioner.

Hal ini pun tidaklah cukup sebentar waktu yang dibutuhkan oleh segenap regulator-regulator untuk meminimalisir atau memberi himbauan, masukan dan peraturan-peraturan yang dibuat.

“Ini adalah keterbatasan masa jabatan KPID itu hanya tiga tahun, sehingga kita tidak bias maksimal apa yang kita rencanakan itu. sebenarnya ini sudah direncanakan oleh komisioner yang sebelumnya jadi komisioner yang 2011-2014 hanya melanjutkan perencanaan program yang sudah dirintis oleh KPID sebelumnya dan pengembangan-pengembangan yang dilakukan oleh KPID sekarang artinya selain melanjutkan itu juga ditambah dengan inovasi-inovasi baru yang ditambah oleh teman-teman KPID yang terbaru ini. Sebenarnya paling tidak masa kerja atau masa jabatan komisioner paling tidak itu lima tahun sehingga dapat memaksimalkan pekerjaan karena kalau hanya tiga tahun itu sangat sulit kita maksimalkan. Dan juga karena permasalahan anggaran, proses anggaran yang lama dengan masa jabatan tiga tahun itu sangat cepat, tidak terasa”. (Jamhur Poti, Ketua KPID Kepri, 3 April 2014).”

“Kita sih sebenarnya di KPID 2012-2014 ini kemarin sudah mengagendakan setelah target di Tanjung Karimun, Batam dan Tanjung Pinang masalah penyiaran selesai, kita ingin memfokuskan konsentrasi kita mendorong perencanaan penyiaran yang berada di Lingga, Natuna dan Anambas”. (Jamhur Poti, Ketua KPID Kepri, 3 April 2014).”

Kurang lamanya masa jabatan membuat kesulitan KPID, karena beberapa agenda yang sudah direncanakan terputus oleh masa jabatan, sehingga membuat agenda atau perencanaan baru oleh KPID pada masa jabatan baru. Sebagian atau bahkan rata-rata yang terpilih menjadi anggota komisioner berasal dari berbagai bidang hanya segelintir saja yang berasal dari bidang linier. Ini yang membuat lama dikarenakan komisioner harus banyak belajar tentang tatanan penyiaran dan juga UU yang berlaku serta P3SPS yang menjadi pedoman bagi pelaku penyiaran.

Kondisi ini terjadi berdampak pada masyarakat. Mulai dari cara berpikirnya, pengetahuannya sampai perilakunya dan ini di dominasi dengan cara berbicara serta penampilan. Selain itu Kepri adalah salah satu wilayah Melayu yang sangat kuat. Budaya ini makin lama makin hilang tergerus akibat tayangan asing yang masuk ke wilayah Kepri.

“Sangat berpengaruh sekali terhadap masyarakat di Kepri ini. Terutama anak-anak yang tinggal di pelosok pulau terluar, mereka sama sekali tidak mengetahui lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bahkan di kepulauan tempat mereka tinggal saja masih banyak masyarakat yang menggunakan pembayaran dengan Dollar atau dengan Ringgit. Rata-rata anak-anak di sana lebih menguasai bahasa Asing dibanding dengan bahasa kedaerahan dalam hal ini menggunakan cakap melayu (berbahasa melayu)”. (Jamhur Poti, Ketua KPID Kepri, 3 April 2014).”

”Wah.. ini sangat berpengaruh sekali mba, kita mulai dari hal yang kecil, misalnya di daerah terluar masih banyak anak pulau yang sama sekali tidak mengetahui lagu Indonesia Raya, tidak paham dengan adat mereka sendiri (Budaya Melayu). Dan yang paling mencengangkan adalah saat ditanya siapa nama Presiden kita, mereka menjawab Perdana Menteri Malaysia”. (Nasrum MD selaku Direktur Lembaga Penyiaran Swasta, 16 April 2014)

Dampak dari wilayah perbatasan sangat dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di wilayah Kepri bahkan masyarakat yang tinggal di pulau terluar. Namun yang anehnya mereka sama sekali tidak ada yang mengeluh atau mengadukan hal tersebut dengan pihak terkait, mereka malah menikmati tayangan dan program radio yang bersiar di Pulau tempat tinggal mereka.

Rupiah adalah mata uang di Indonesia, namun di pulau terluar ini tidaklah menggunakan Rupiah sebagai alat jual beli mereka. Sebagian dari mereka ada yang menggunakan Dollar Singapura dan ada juga sebagian dari mereka menggunakan Ringgit. Miris sekali melihat kejadian-kejadian “unik” ini di Negara sendiri masih banyak hal yang tidak terjamah oleh pemerintah pusat.

Wilayah perbatasan ini seperti yang sudah dijelaskan di sub sebelumnya, permasalahan ini menimbulkan efek bagi masyarakat. Mengubah afektif, kognitif serta behavioral masyarakat.

“Efeknya dibedakan dalam beberapa kelompok kalau boleh saya katakan. Misalnya kalau untuk penyebaran informasinya sangatlah kurang akibat letak geografis dan kurang minatnya para investor untuk membuat stasiun TV atau pun Stasiun radio. Kemudian untuk masyarakatnya, mereka mengalami perubahan social yang sangat signifikan, kalau boleh saya katakana. Karena Budaya Melayu di Kepri sudah tidak begitu terlihat. Biasanya kan mulai dari anak-anak sampai orang dewasa pun menggunakan bahasa Melayu atau bagi anak-anak sekolah pakaian Melayu dipakai sekali seminggu, tetapi saya sudah tidak melihat peraturan itu lagi dalam sekolah-sekolah yang ada di Kepri. Selain itu yang lebih bahayanya lagi anak-anak yang tinggal didaerah pulau terluar sama sekali tidak memiliki rasa nasionalisme Indonesia”. (Jamhur Poti, Ketua KPID Kepri, 3 April 2014).”

Dampak dari permasalahan penyiaran terhadap masyarakat yang tinggal di Kepulauan Riau, sangatlah jelas. Seperti yang sudah penulis jelaskan di sub sebelumnya, jika di lihat dari dampak tayangan asing yang masuk bebas di kawasan perbatasan mempengaruhi afektif, kognitif serta behavioral masyarakat Kepri.

Provinsi Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan Negara-negara tetangga tanpa sadar kita telah terjajah oleh siaran-siaran mereka secara *free to air*. Hampir 100% wilayah Kepulauan Riau mendapat terpaan siaran-siaran asing. Dengan hanya bermodalkan antena biasa masyarakat Kepulauan Riau bisa menikmati siaran Channel 5, Suria, U Channel, Channel News Asia, Channel 8, art Central, Kids central, TV 9, RTM 2, TV 3, TV 2, TV 1 dengan hasil audio yang lebih jernih, dan kalau radio ada Warna, Ria, Class, Shimphoni, Yes, Gold dan Capital. Sementara di sisi lain hampir 80% wilayah Kepulauan Riau tidak bisa menerima siaran Indonesia secara *free to air* dalam batas minimal sekalipun. Yang dimaksud siaran secara minimal adalah satu televisi publik, satu televisi swasta, satu radio publik dan satu radio swasta.

Bahkan lebih memprihatinkan lagi masih banyak pulau-pulau yang masuk katagori *blankspot* atau tidak bisa menerima siaran Indonesia sama sekali. Dengan demikian tidaklah aneh jika sebagian masyarakat *hinterland* lebih fasih menyanyikan lagu *Majulah Singapura* dari pada lagu *Indonesia Raya*.

4.2.4. *Controlling* atau *Evaluating*

Setelah semua sudah dirumuskan menjadi perumusan masalah dan melakukan pelaksanaan sesuai rencana, tugas KPID Kepri tidak begitu saja selesai proses akhirnya adalah memonitoring dan melakukan evaluasi selama masa tenggang yang sudah ditentukan.

- A. ***Controlling*** : Suatu proses untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan organisasi atau perusahaan sudah tercapai atau belum, untuk mengetahui bahwa kegiatan berjalan dengan baik dan tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari rancangan semula. Maka diperlukannya koreksi dan evaluasi.

“Setelah sudah disetujui kesepakatan-kesepakatan di bidang isi siaran, kelembagaan dan perizinan dan juga kesepakatan untuk KPID yang masuk dalam wilayah perbatasan.”

“Ya setelah kami melakukan beberapa langkah strategi, lalu kami memonitoring dan mengevaluasi. Ini tidak dipukul rata ya... proses monitoring dan evaluasi berbeda, misalnya untuk jangka waktu tv atau radio swasta dan tv atau radio komunitas tentu jangka dan masa tenggangnya berbeda-beda. Kemudian setelah mendapatkan IPP sementara, baru kita monitor dan evaluasi mereka, apakah sudah mengikuti aturan yang berlaku atau belum. Terkadang masih banyak yang membandel untuk para pelaku penyiaran, ada saja peraturan yang jelas diberlakukan tapi tidak diindahkan oleh para pelaku penyiaran. Misalnya lagi jika permasalahan ini terjadi dibidang konten isi siaran, ada beberapa pelaku penyiaran melanggar P3SPS, siarannya melanggar norma,

lalu kami member surat teguran. Nah, disitu kita pantau, masih tidak mereka melakukan kesalahan yang sama atau bahkan melakukan kesalahan atau pelanggaran lain. Ya masih banyak lagi”.

“Namun hal ini juga tidak lepas dari peran masyarakat sendiri. Karena bagaimanapun sebenarnya masyarakat yang punya peran penting disini. Ada atau tidaknya suatu pelanggaran yang terjadi dalam budaya, suku dan agama, masyarakatlah yang seharusnya lebih peka terhadap tayangan tv atau radio. Selama tayangan tersebut diminati oleh masyarakat padahal jelas-jelas itu melanggar, KPID tidak punya bukti yang kuat untuk member teguran kepada pelaku penyiaran.” (Jamhur Poti, Ketua KPID Kepri, 3 April 2014).”

KPID memberikan beberapa contoh kasus bagaimana dan monitoring serta evaluasi apa yang dilakukan agar para pelaku penyiaran ini tidak ‘memandel’. Semua aturan dan perundang-undangan yang tercantum pada UU 32 tentang penyiaran dan juga P3SPS jelas tertulis apa saja yang harus dilakukan dan dipatuhi lalu apa saja yang tidak boleh dilakukan. Masa tenggang dan berlaku juga jelas tertulis di sana.

Selain itu juga peran masyarakat juga sangat dibutuhkan karena itu sebagai bukti kuat atas tayangan atau program yang mengganggu masyarakat khususnya Kepulauan Riau

- B. **Evaluating** : Melakukan evaluasi ulang atau memberi penilaian terhadap program acara yang sudah berlangsung.

“Monitoring itu selalu kami lakukan sampai benar-benar kesepakatan tersebut menjadi sebuah PP atau Permen atau menjadi UU, sehingga ketika kita turun di lapangan ada pegangan hukum yang jelas, ya.. secara gak langsung mempermudah kita ketika kita bertindak.”

“Beberapa yang sudah dijalankan kita melakukan evaluasi, misalnya yang paling jelas adalah proses perizinan calon pelaku penyelenggara penyiaran, baik swasta ataupun komunitas. Kalau mengevaluasi bidang infrastruktur atau isi siaran prosesnya agak lama karena berjalan seiring dengan kerjasama oleh RRI, TVRI,

BNPP dan juga Kominfo.” (Jamhur Poti, Ketua KPID Kepri, 3 April 2014).”

Proses akhir adalah evaluasi. Ini dilakukan untuk memantau apakah kesepakatan KPIDP dapat berjalan dengan baik atau tidak, sehingga aspek kontrol dan evaluasi ini selalu dilakukan sampai proses perizinan benar-benar maksimal. Dan juga MOU yang dilakukan dengan instansi yang terkait dapat berjalan dengan baik walaupun butuh banyak waktu untuk menjalankannya.

Optimalisasi Peran dan Fungsi Komisi Penyiaran Indonesia di Daerah Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau:

1. Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merupakan lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Oleh sebab itu sesuai dengan wewenang, tugas dan kewajibannya, KPI mengarahkan sistem penyiaran Indonesia sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Penyiaran. Khususnya pasal-pasal yang mengatur azas, tujuan, fungsi dan arah penyiaran serta konsiderannya.
2. Tujuan Penyiaran Memperkukuh Intergrasi Nasional : Di dalam pasal 3, UU Penyiaran disebutkan bahwa penyiaran diselenggarakan dengan tujuan salahsatunya untuk memperkukuh integrasi nasional, untuk itu perlu adanya kebijakan untuk menyentuh persoalan daerah perbatasan dari sisi penyiaran.

3. Secara empirik, kebutuhan akan informasi permasalahan sosial, politik, budaya, ekonomi memerlukan distribusi informasi hiburan melalui penyiaran terutama di wilayah perbatasan di Indonesia. Di Provinsi Kepulauan Riau masih ada interference lembaga penyiaran asing baik dari Malaysia, Singapura, Thailand bahkan Australia.
4. Provinsi Kepri yang berbatasan langsung dengan sejumlah negara tetangga, dianggap rentan terhadap terjadinya gangguan yang bisa mengancam stabilitas keamanan, termasuk sosial budaya. Karena itu, peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah sangat penting di dalam konteks penataan sistem penyiaran atau lanscape penyiaran Indonesia.
5. Perlu dilakukan terobosan dan inisiatif terhadap kondisi Kepri yang terletak di perbatasan negara luar. Konten siaran dari relay TV Kabel mulai dari produk iklan sampai dengan tayangan-tayangan yang mengandung unsur pornografi dan juga pornoaksi serta sangat mudahnya siaran Negara tetangga terutama Singapura dan Malaysia memberikan pengaruh terhadap wawasan kebangsaan, isu nasionalisme dan integrasi nasional dan berpotensi mengubah paradigma masyarakat.
6. Inisiatif KPI yakni kompilasi database dan blue print yang terkait dengan keberadaan lembaga penyiaran atau layanan penyiaran di wilayah perbatasan pada tahun 2012 serta langkah konkret lainnya yakni penyelenggaraan forum pertemuan antara KPI pusat dengan 12 KPID di wilayah perbatasan KPID Aceh, Sumatera Utara, Riau,

Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat yang diselenggarakan di Batam tanggal 28-30 Juni 2012 setidaknya telah memetakan keberadaan lembaga penyiaran, kondisi geografis dan beberapa persoalan penyiaran, serta dampak-dampaknya di wilayah KPID yang secara administrasi berhubungan dengan layanan penyiaran di wilayah perbatasan tersebut.

7. Perlu diakselerasi dan optimalisasi peran Lembaga Penyiaran Publik (TVRI dan RRI) dan LPP lokal untuk melayani kebutuhan akan informasi, hiburan dan edukasi bagi masyarakat perbatasan, dalam konteks mengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang berfungsi sebagai perekat sosial atau pemersatu integrasi bangsa.

8. Perlu segera dibentuk Komisi Penyiaran Daerah Perbatasan sebagai langkah antisipasi dalam upaya menangkal pengaruh asing terutama pada sektor penyiaran baik melalui elektronik, radio dan media massa. Menggagas forum bersama media, sehingga diharapkan KPID Kepri menjadi leader. Dengan adanya forum bersama ini diharapkan dapat mengantisipasi dampak distribusi informasi melalui penyiaran sehingga masalah-masalah yang timbul di perbatasan dapat dieliminir.

9. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dan Forum Komisi Penyiaran Daerah dapat berperan sebagai lembaga advokasi tentang masalah sosial, ekonomi pertahanan dan keamanan di perbatasan. Perlu

dipikirkan terhadap adanya radio komunitas di perbatasan yang nantinya dapat dimanfaatkan bagi nelayan dan masyarakat pesisir yang jauh dari informasi.

10. Perlu dilakukan sinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi sendiri untuk mendukung penuh aktifitas penyiaran dan memperhatikan kebutuhan fasilitas penunjang perangkat penyiaran di daerah terutama di daerah perbatasan. Selain itu perlu dilakukan pembinaan serta meningkatkan radio komunitas, khususnya di daerah-daerah perbatasan terutama di Batam, Bintan, Karimun, Natuna dan Anambas. Sebab, dengan adanya siaran-siaran tersebut ikut membantu menjaga tali silaturahmi serta menjaga perbatasan Republik Indonesia.

4.2.4. Hambatan dan Kendala

Semua yang dijalankan oleh KPID Kepri belumlah maksimal, ini diakibatkan beberapa hambatan dan kendala.

“Bicara tentang hambatan dan kendala, banyak sekali yang dihadapi misalnya:

1. Panjangnya proses administrasi perizinan di Kemkominfo RI (± 400 hari)
2. Penyeragaman prosedur perizinan antar LPS dan LPK
3. Klasifikasi Kepri yang masuk kelas C (Effective Radiated Power, ERP : 4 kw, maks 12 km)
4. Alokasi frekuensi LPS Radio yang sedikit untuk kota Batam dari Kemkominfo RI sementara pemohon banyak.
5. Transparansi manajemen keuangan sekretariat minim
6. Minimnya anggaran operasional komisioner

7. Masa jabatan KPID tidak cukup untuk menjalankan agenda yang sudah direncanakan
8. Kendala transportasi (jarak tempuh) antar kabupaten/kota
9. Belum ada kepastian yang jelas tentang koordinasi (G to G) dengan pihak Negara Singapura dan Malaysia.
10. Secara empiric, kebutuhan akan informasi permasalahan social, politik, budaya ekonomi memerlukan distribusi informasi hiburan melalui penyiaran terutama di wilayah perbatasan di Indonesia
11. Di Provinsi Kepulauan Riau masih ada interference lembaga penyiaran asing baik dari Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam bahkan Australia
12. Posisi provinsi Kepri yang berbatasan langsung dengan sejumlah Negara tetangga, dianggap rentan terhadap terjadinya gangguan yang bias mengancam stabilitas keamanan, termasuk social dan budaya
13. Karena itu, peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah sangat penting dalam konteks penataan system penyiaran atau landscape penyiaran Indonesia
14. Informasi tentang ekonomi dan pembangunan belum terosilisasi secara baik karena banyaknya daerah perbatasan yang masih *blank spot*
15. Kurangnya pembinaan terhadap masyarakat dan akses pemerintah pusat maupun daerah ke kawasan perbatasan
16. Lokasi daerah perbatasan relative terisolasi dari pusran geliat ekonomi bangsa
17. Kesenjangan social ekonomi masyarakat perbatasan dengan masyarakat Negara tetangga mempengaruhi watak dan pola hidup masyarakat setempat
18. Rendahnya minat para pengusaha penyiaran untuk mendirikan lembaga penyiaran di kawasan perbatasan

“Inilah yang KPID Kepri alami, hambatan dan kendala ini menjadi hal-hal yang penting untuk dibicarakan kembali pada Rakornas berikutnya.” (Jamhur Poti, Ketua KPID Kepri, 3 April 2014).”

4.3. Pembahasan

Dari hasil penelitian diketahui bahwa Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah sebuah lembaga Negara yang bersifat independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga Negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Untuk di setiap provinsi di seluruh Indonesia di wakili oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) adalah sebuah lembaga Negara independen di Indonesia yang didirikan di setiap provinsi berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di setiap provinsi di Indonesia. Dasar hukum pembentukannya sama-sama dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Segala sesuatu dan aktifitas penyiaran di bawah wewenang KPI.

Indonesia terdiri dari daerah kepulauan yang sangat banyak dan juga dibatasi oleh Negara-negara tetangga. Kemudian ini juga menjadi permasalahan yang unik karena penulis membahas tentang daerah Kepulauan Riau, Kepri adalah salah satu dari 12 provinsi yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga. Lalu dibentuklah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Perbatasan yang dilaksanakan untuk pertama kalinya di Provinsi Kepri sebagai pencetus atau yang menginisiatifkan pembentukan KPIDP.

Pembentukan KPIDP dibentuk guna kebutuhan masyarakat akan informasi, pendidikan dan hiburan di wilayah perbatasan dapat terpenuhi secara merata. Selain itu tidak hanya kebutuhan informasi saja tetapi banyak masalah-masalah yang terjadi di setiap provinsi di Indonesia yang berbeda-beda pula. Karena budaya yang berbeda, berbatasan dengan Negara tetangga yang berbeda,

kondisi kawasan perbatasan yang berbeda, lalu dipengaruhi dengan tingkat pendidikan, langkanya sumber daya manusia yang terdidik dan masih banyak lagi.

James A.F. Stoner mendefinisikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan, usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan, (Morrison 2004:129).

Dalam penjabaran di atas proses atau manajemen bukan semata-mata untuk diterapkan dalam suatu organisasi seperti yang dijabarkan oleh **James A.F Stoner**, melainkan perencanaan ini bagian proses perumusan masalah yang terjadi di wilayah perbatasan terutama Kepulauan Riau. Selain perumusan masalah KPID Kepri dan KPIDP juga membuat draft permasalahan yang terjadi dari masing-masing provinsi. Dan ini dilakukan oleh seluruh KPID-KPID perbatasan di Batam selama tiga hari, agenda ini dilakukan secara rutin dan selalu *include* di dalam agenda Rakornas. *Organizing* di sini bukan sebagai pengorganisasian melainkan mengelompokkan per sub bidang, baik bidang kelembagaan, bidang perizinan dan juga bidang konten isi siaran.

Actuating (pengarahan) di sini bukan dimaksud sebagai pemberian arahan antara atasan kepada bawahan seperti yang dijelaskan konsep manajemen oleh **James A.F. Stoner** tetapi pengarahan di sini adalah ketua dan seluruh jajaran komisioner member tindakan oleh para pelaku penyiaran yang melakukan pelanggaran terhadap isi tayangan atau program dan juga terhadap proses kepengurusan izin, itu salah satu contohnya. *Controlling* (pengawasan) di sini bukan dimaksud sebagai pengawasan antara atasan kepada bawahan seperti yang dijelaskan konsep manajemen oleh **James A.F. Stoner** tetapi setiap anggota

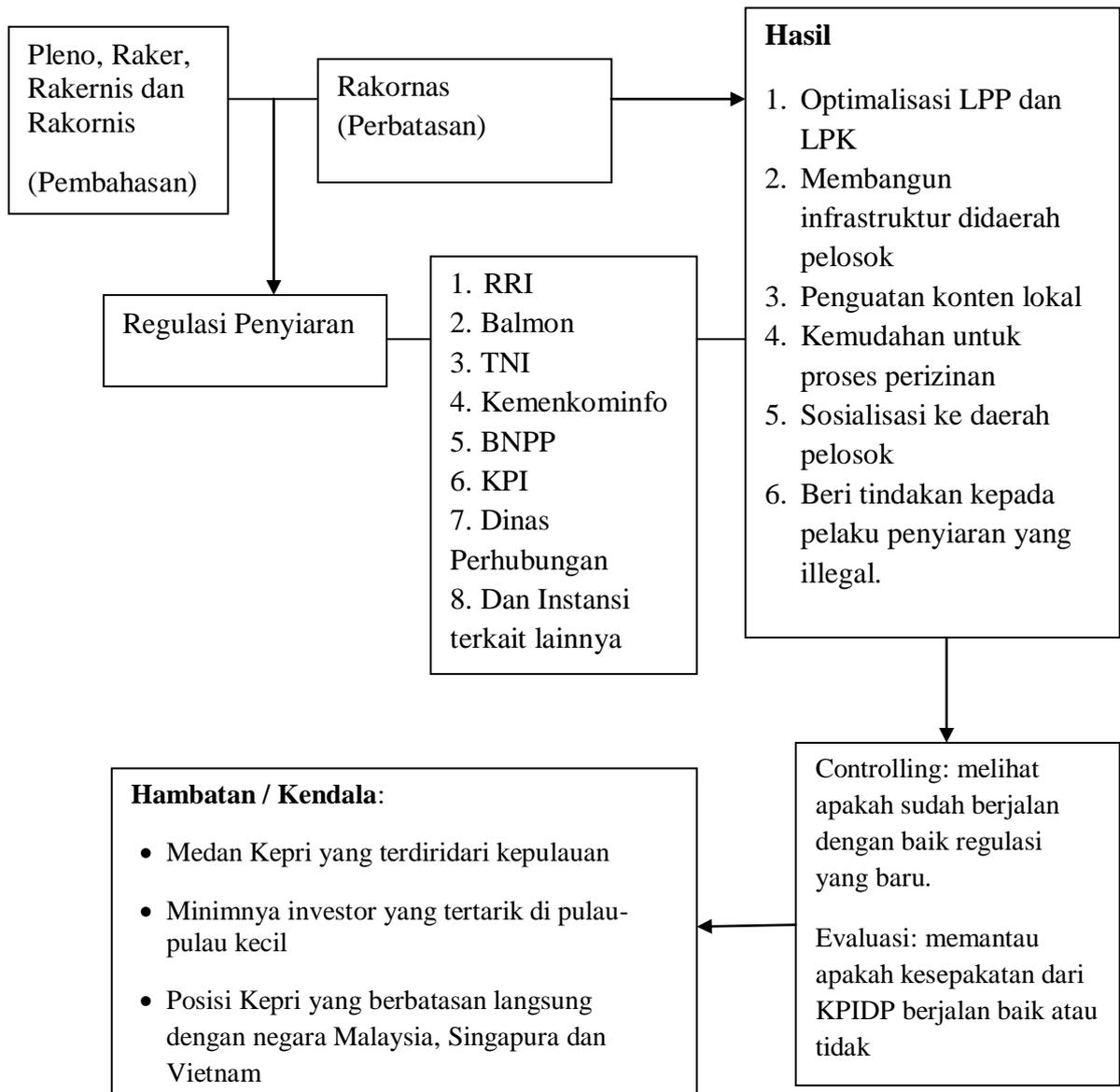
komisioner mengawasi para pelaku penyelenggara penyiaran baik televisi maupun radio dan juga TV kabel. *Evaluating* di sini bermaksud untuk melihat kinerja para pelaku penyiaran dan memantau sudah sampai dimana kerja yang mereka lakukan, kemudian selalu mengingatkan agar point-point kesalahan yang sering terjadi tidak dialami oleh para pelaku penyiaran.

Permasalahan-permasalahan perbatasan yang cukup unik ini menjadi peran bersama antara KPI, KPID, KPIDP, Instansi-instansi terkait dan juga masyarakat menjadi hal terpenting guna menyelamatkan hak-hak masyarakat dalam menerima informasi yang masuk ke wilayah mereka. Sehingga tidak terjadi bergesernya nilai budaya Melayu yang lekat pada Provinsi Kepri menjadi budaya asing dari Negara tetangga.

Langkah kongkrit KPI menyelenggarakan forum pertemuan antara KPI Pusat dengan dua belas KPID di wilayah perbatasan, yang diselenggarakan di Batam pada tanggal 28-30 Juni 2012. Yang dihadiri oleh 12 provinsi yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga. Forum ini dilaksanakan di Mercure Hotel dimana setiap KPID perbatasan mempresentasikan mapping keberadaan lembaga penyiaran, kondisi geografis dan beberapa persoalan penyiaran serta dampak-dampak diwilayah KPID yang secara administratif berhubungan dengan layanan penyiaran diwilayah perbatasan tersebut.

Model Strategi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dalam

Mendorong Penyiaran Perbatasan:



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

- a. Indonesia memiliki 12 wilayah yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga. Provinsi-provinsi tersebut antara lain Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Riau, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Aceh, Sulawesi Utara dan Sumatra Utara. Dan Provinsi yang berbatasan dengan Negara tetangga terbanyak adalah Provinsi Kepulauan Riau, yang berdekatan dengan Negara Singapura, Malaysia dan dan di Pulau terujung Anambas berdekatan dengan Negara Vietnam.

- b. Kepulauan Riau adalah salah satu kota kepulauan. Persentase wilayahnya terdiri dari 96% adalah lautan dan 4% adalah daratan. Kabupaten-kabupatennya jaraknya yang harus ditempuh sangatlah berjauhan. Pulau ini memiliki 2 Ibu Kota dan 5 Kabupaten. Ibu Kota terdiri dari Batam dan Tanjung Pinang. Sedangkan Kabupatennya adalah Bintan, Karimun, Natuna, Anambas dan Lingga. Daerah perbatasan adalah daerah yang sangat rawan sekali dengan dampak yang diakibatkan oleh media. Terlihat jelas sekali terpaan media atau pengaruh asing yang masuk wilayah Kepri. Melalui media penyiaran, terpaan itu mempengaruhi masyarakat dengan cepat. Salah satu contohnya adalah bagaimana cara berpikir, cara berpakaian, bahkan cara perilaku daerah perbatasan ini menunjukkan bahwa sudah menceritakan terkikisnya adat kebudayaan

khas Kepri sudah mulai nampak. Permasalahan dari berbagai daerah berbeda-beda. Salah satu permasalahannya adalah daerah perbatasan pulau terluar dari Kepri, anak-anak yang tinggal di pulau tersebut tidak hapal lagu nasionalnya sendiri (Indonesia Raya), bahkan polisi perbatasannya tidak mengenal presiden Indonesia dan yang lebih parahnya lagi, mereka sama sekali tidak dapat informasi dari Indonesia. Penjelasan ringkas diatas dapat dinyatakan bahwa rasa nasionalis sudah mulai luntur dan budaya khas dari daerah Kepri ini (Budaya Melayu) makin lama makin tenggelam.

- c. Letak geografis inilah membuat susah masuk dan tersebarnya informasi. Informasi yang masyarakat dapatkan langsung dari Negara tetangga. Pulau-pulau terluar masih menggunakan mata uang Dollar dan Ringgit untuk bertransaksi jualbeli, padahal itu di Indonesia, yang seharusnya memakai Rupiah. Bagaimana dengan Afektif, Kognitif dan Behavioral masyarakat dalam hal ini? Gempuran tayangan asing yang masuk bertubi-tubi ke Indonesia, tanpa disadari tayangan itu memberi dampak bagi perubahan yang signifikan bagi pola pikir, perilaku sampai kebiasaan-kebiasaan yang dari pada pemain film atau pemeran dari suatu tayangan. Ironisnya, mayoritas masyarakat cenderung meniru dan bahkan mengikuti budaya asing yang masuk melalui televisi maupun radio. Persoalan tersebut berkembang menjadi luas bagi provinsi-provinsi daerah yang berbatasan langsung dengan negara luar. Bukannya budaya nasional yang berkembang namun justru busaya asing yang mulai menggerogoti nilai kebudayaan masyarakat di Indonesia. Lembaga yang

mengawasi penyiaran pun mengambil andil dalam persoalan ini. Menjadi perhatian khusus bagi KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) selaku lembaga independent yang mengawasi persoalan dalam penyiaran ini. KPI menganggap makin tipisnya pertahanan kedaulatan dalam permasalahan yang terjadi di daerah perbatasan. Di setiap Provinsi KPI di wakili oleh KPID yaitu Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, memiliki tupoksi yang sama dengan KPI. Kemudian karena wilayah Kepri yang berbatasan dengan Negara tetangga, KPID Kepri berinisiatif membentuk KPIDP (Komisi Penyiaran Daerah Perbatasan) dalam Rapat Koordinasi Nasional yang terdiri dari 12 Provinsi dan akhirnya KPIDP terbentuk.

- d. Perumusan masalah yang terjadi di daerah perbatasan sangatlah kompleks dan *unik*. Masing-masing provinsi memiliki permasalahan yang berbeda, terutama yang terjadi di Kepri. Perumusan ini dibedah dalam setiap pertemuan, dalam Rakornas, Raker, Rakernas, FGD dan ataupun pertemuan yang sering dilakukan oleh KPI Pusat.
- e. Peran Instansi-instansi yang terkait dalam perbatasan, misalnya TNI, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), Kominfo, Balai Monitoring (Balmon), RRI, TVRI, stasiun-stasiun local (swasta dan komunitas) dan juga KPID harus selaras dengan persoalan atau permasalahan yang terjadi di Kepri. Dan tidak lupa pula peran terbesar dalam hal ini adalah masyarakat itu sendiri, karena kebanyakan dari stigma pemikiran masyarakat larut dalam derasnya tayangan atau program asing yang masuk ke Kepri. Dan bahayanya dari masyarakat kepulauan yang berda di Pulau terluar mengatakan, mereka lebih menyukai

tayangan dan program yang berasal dari Negara Singapura ataupun Malaysia dibandingkan tayangan dan program dari Indonesia.

- f. Jika keseluruhan Instansi terkait kemudian dengan bantuan dari masyarakat terkikisnya budaya Melayu yang kental dalam Kebudayaan Kepri tidak akan luntur, informasi dapat masuk ke wilayah-wilayah terluar, dapat menjaga integrasi bangsa dan menjaga kedaulatan Negara kita.

5.2. Saran

Diakhir kesimpulan ini, penulis ingin menjelaskan bahwa penelitian ini dapat berguna sebagai tolak ukur bahwa strategi komunikasi yang dilakukan KPID Kepri guna mendorong penyiaran perbatasan tidak lepas dari peran Instansi terkait dalam perbatasan dan peran masyarakat itu sendiri.

Dari hasil penelitian yang sudah didapat, penulis memiliki beberapa saran atau masukan yang berguna bagi KPI pusat, Balai Monitoring, Kominfo Pusat dan Lokal sebagai berikut:

- a. Penyediaan sumber daya listrik dengan kapasitasnya memadai dan mudah dalam pemeliharaannya, misalnya : listrik solar celi atau pembangkit listrik tenaga angin. Genset dianggap kuramh karena kesulitan dalam penyediaan bahan bakar diesel.

- b.** Perangkat pemancar tanpa operator yakni menggunakan pemancar relay/repeater, dalam hal ini isi siaran diambil dari stasiun produksi terdekat.
- c.** Pelatihan dasar tentang penyiaran melalui memberdayaan masyarakat setempat.
- d.** Stimulus bagi lembaga penyiaran sebagai upaya peningkatan minat investor membangun penyiaran di daerah, misalnya : dukungan pengurangan berbagai macam biaya operasional terkait (seperti: bhp frekuensi, bantuan perangkat penyiaran, dsb).
- e.** Dukungan dalam rangka operasional dan pemeliharaan perangkat dapat berkoordinasi/bekerjasama dengan batalion TNI yang bertugas di perbatasan dan atau penyelenggara telekomunikasi telah melayani di perbatasan.
- f.** Membangun sarana penyiaran baru dengan kuantitas dan kapasitas yang lebih memadai. Penyediaan aneka ragam saran akses informasi yang mudah dan murah.
- g.** Perlu dilakukan terobosan dan inisiatif terhadap kondisi Kepri yang terletak di perbatasan Negara luar. Konten siaran dari relay TV Kabel mulai dari produk iklan sampai dengan tayangan-tayangan yang mengandung unsure pornografi dan juga pornoaksi serta sangat mudahnya siaran Negara tetangga terutama Singapura dan Malaysia memberikan pengaruh terhadap wawasan Kebangsaan,

isu nasionalisme dan integrasi Nasional dan berpotensi mengubah paradigm masyarakat.

- h.** Pemanfaatan TV atau radio komunitas di perbatasan yang nantinya dapat dimanfaatkan bagi nelayan dan masyarakat pesisir yang jauh dari informasi.
- i.** Perlunya dilakukan sinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi sendiri untuk mendukung penuh aktifitas penyiaran dan memperhatikan kebutuhan fasilitas penunjang perangkat penyiaran di daerah terutama di perbatasan.
- j.** Perlu dilakukan pembinaan serta meningkatkan TV dan radio komunitas, khususnya di daerah-daerah perbatasan terutama di Batam, Bintan, Karimun, Natuna dan Anambas, sebab dengan adanya siaran-siaran tersebut, ikut membantu menjaga tali silaturahmi serta menjaga perbatasan republic Indonesia.
- k.** Mempercepat proses perizinan serta memperbanyak program Desa Informasi di Kepulauan Riau guna mengurangi *blank spot*.
- l.** Memperbanyak rapat koordinasi antar secretariat oleh KPI Pusat tentang pentingnya mendukung kinerja Komisioner.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Subiantoro, FX Suwanto. 2006. *Metode dan Penelitian Sosial*. Yogyakarta: CV ANDI OFESAT.
- Arifin, Anwar. 2004. *Strategi Komunikasi*. Bandung: Armico.
- Arifin, Anwar. 2011. *Sistem Komunikasi Indonesia*. Jakarta: Simbiosis Rekatama Media.
- Bambang, Setiawan. 2005. *Metode Penelitian Komunikasi*. Jakarta: UT.
- Bogdan, Robert C dan Sari Knopp Biklen. 2002. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon, Inc.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bungin, Burhan. 2007. *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Deddy, Mulyana. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Denzin, NK. 1978. *The Research Act : A Theoretical Introduction In Sociological Methods*. New York: McGraw-Hills.
- Effendy, Onong Uchjana. 2004. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Effendy, Onong Uchjana. 1991. *Radio Siaran Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Tineke Cipta.
- Helena. 2006. *Reportase Radio*. Jakarta: PT.Indeks.
- Jalaludin, Rahmad. 2005. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: PT. Rosdakarya.
- Kohler, dalam Muhammad Arni. 2005. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Lawrence R, William F. Glueck. 2005. *Manajemen Strategi dan Kebijakan Perusahaan*. Jakarta : Edisi ketiga.

- Lewis, Philip. Tanpa tahun. 2000. Teori Organisasi dan Komunikasi. Terjemahan oleh Gazali Rahman. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Lexy, J Moleong. 2004. Metode Penelitian Kualitatif edisi revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moh, Nazir. 2005. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nasution, Z. 2006. Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya. Jakarta: Raja Grafiika Persada.
- Neuman, William Lawrence. 2003. Social Research Methods: Qualitative and quantitative Approaches. Pearson Education.
- Patton, Michael Quinn. 2001. Qualitative Research & Evaluation Methods, 3rd Edition. California: Sage.
- Ratna, Dwi Liza. 2008. Teori Komunikasi. Jakarta: Renata Pratama Media.
- Sugiono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D. Bandung: Alfabeta.
- Vardiansyah, Dani. 2004. Pengantar Ilmu Komunikasi. Depok: PT. ghalia Indonesia.
- West, Richard. 2009. Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi. Jakarta: Salemba Humanika.

SUMBER LAIN

Profil dan dinamika penyiaran di perbatasan negara kesatuan republik indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Dedy Nur Hidayat, Jurnal Thesis volume III/no. 3 September – Desember 2004, Departemen I Komunikasi (FISIP UI)